



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kata Pengantar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2019 – 2023 oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 hendaknya dapat merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan, senantiasa tetap berpegang pada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*).

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

Dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, harapan kami pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dan operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat searah, sejalan, selaras dan berkesinambungan dengan Dokumen RPJP

Provinsi Kalimantan Timur serta Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Samarinda, Desember 2021

Kepala Dinas Perhubungan



A.F.F. SEMBIRING S.IP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690526 201609 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	75
Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	78
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	78
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	85
3.3. Hasil Telaahan Renstra K/L	97
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	109
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	117
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	120
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	120
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	125
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	125
Bab VI Rencana Program danKegiatan Serta Pendanaan.....	130
6.1. Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur	130

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.	139
Bab VIII Penutup.....	141
8.1. Kesimpulan	141
8.2. Saran.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor.

Kondisi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur saat masih belum stabil dan saat ini diperparah oleh dampak krisis global, sehingga angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan lemahnya kemampuan berkompetisi dalam skala global perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga secara bertahap dan sistematis dapat ditangani. Kegiatan pembangunan bidang perhubungan mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong upaya pemerataan dan laju pembangunan daerah.

Upaya menggali potensi sumber daya yang ada di berbagai daerah, pengembangan sentra-sentra produksi dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar tentunya harus didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi wilayah menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, termasuk bidang perhubungan harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan, sehingga akan mampu membangun sinergi bagi upaya memacu laju pembangunan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Provinsi harus mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan program pembangunan, yang kemudian dijabarkan pada masing-masing sektor dan atau lembaga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Secara yuridis formal, integrasi RENSTRA Pembangunan dalam skala Nasional dan Daerah ini telah tertuang

dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, disusun mengacu pada keselarasan program-program prioritas yang mendukung upaya penyelesaian program strategis nasional yang termuat di Renstra Kementerian Perhubungan RI dan keterkaitan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda Nomor : 02 Tahun 2019, yang memuat konsep, kebijakan dan program pembangunan bidang Perhubungan.

Mengingat kegiatan pembangunan bidang perhubungan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA harus memberi ruang yang cukup bagi partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kemampuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat tetap terjaga.

Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 86 Tahun 2017, Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan SKPD, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi program Gubernur dan Wakil Gubernur, telaahan hasil evaluasi Renstra lima tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 - 2023 disusun berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah menyelaraskan agenda perencanaan pembangunan bidang Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perubahan Provinsi Kalimantan Timur untuk rentang waktu implementasi perencanaan tahun 2019 – 2023.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan bidang perhubungan ;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan Bidang Perhubungan ;
3. Mengakomodasikan seluruh aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum ;
4. Menetapkan hasil kegiatan penelitian ini sebagai kebijakan pembangunan Bidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Menyelaraskan dengan dinamika perubahan yang terjadi pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, sistematika Penulisan Perubahan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota, juga memuat landasan hukum, maksud dan tujuan Renstra Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Bab III :Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sekaligus Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV :Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan/sasaran pada tahun berjalan sampai dengan lima tahun kedepan.

Bab V :Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, juga akan menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi

RPJMD periode 2019-2023, berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu secara effect langsung (*direct effect*) dan effect tidak langsung (*indirect effect*) memberikan stimulus dan manfaat ekonomi (*economic benefit*) yang tinggi. Demikian juga sebaliknya harus mampu mengeliminasi dampak samping operasional transportasi jalan yang dapat menimbulkan beban dan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*).

Oleh karenanya didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan ditetapkan sebagai bagian kegiatan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Kalimantan Timur, yaitu dalam hal pencapaian perwujudan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit usaha dan lembaga - lembaga ekonomi.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan di Bidang Perhubungan

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, maka pembagian urusan pemerintahan

bidang perhubungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kewenangan:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi
- f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. Penetapan kawasan perKotaan untuk pelayanan angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi dan perKotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perKotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam Trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang Melayani trayek antarKota dalam daerah Provinsi serta Angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi;

2. Sub Urusan Bidang Pelayaran, Kewenangan :

- a. Penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar-daerah Provinsi , dan pelabuhan internasional;
- c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan;
- d. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kab/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi;
- e. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi.
- f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
- g. Penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan besertamuatannya pada lintas penyebrangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul regional;
- i. Pembangunan, Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul regional;
- j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi;

- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul regional;
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- o. Penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional.

3. Sub Urusan Bidang Perkeretapian, Kewenangan :

- a. Penetapan rencana induk perkeretapian Provinsi ;
- b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kab/Kota;
- c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 daerah Kab/Kota dalam Provinsi ;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi ;
- e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi ;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretapian pada jaringan jalur perkeretapian Provinsi ;
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Merujuk Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016, Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Struktur Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
 - Subbag Umum
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Lalu Lintas Jalan
 - Seksi Angkutan Jalan
 - Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
3. Bidang Pelayaran
 - Seksi Kepelabuhanan
 - Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
 - Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

4. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- Seksi Perkeretaapian
- Seksi Lingkungan Perhubungan
- Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan

5. UPTD Terminal Type B

- Subbag Tata Usaha
- Seksi Operasional I
- Seksi Operasional II

2.1.2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu 2 Kasubbag yaitu Kasubbag Perencanaan, Program & Keuangan dan Kasubbag Umum dengan tugas sebagai berikut :

A). Tugas Sub. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

B). Tugas Sub. Bagian Umum

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2.1.2.2. Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang LLAJ dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian lalu lintas jalan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas Jalan pada jalan -jalan Provinsi dan mengusulkan kebutuhan pada jalan - jalan Nasional.

B) Tugas Seksi Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan jalan.

C) Tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.1.2.3. Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayaran

1. Tugas

Melaksanakan koordinasi , Pembinaan dan Pengendalian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyiapan penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut wilayah laut Provinsi, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan Provinsi, dan penetapan lintas penyebrangan dalam Provinsi, serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayaran dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepelabuhanan.

B) Tugas Seksi Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

C) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.

2.1.2.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

1. Tugas

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian di Kabupaten / Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil, Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:

A) Tugas Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perkeretaapian.

B) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Lingkungan Perhubungan.

C) Tugas Seksi Keterpaduan Moda & Teknologi Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan.

2.1.2.5. UPTD Terminal

1. Tugas

Pembinaan, bimbingan, pengendalian pengawasan dan operasional terminal tipe B diKab. Paser, Kab.Penajam Paser Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar),Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, Melakukan monitoring dan evaluasi operasional UPTD Terminal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.

2. Fungsi

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam operasional dan pengendalian terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Paser Penajam Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau.

- b. Mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Terminal dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD Terminal Type B dibantu 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat diselesaikan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan dan tertib administrasi.
6. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan,

dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas dan evaluasi selanjutnya.

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

B) Seksi Operasional Wilayah I

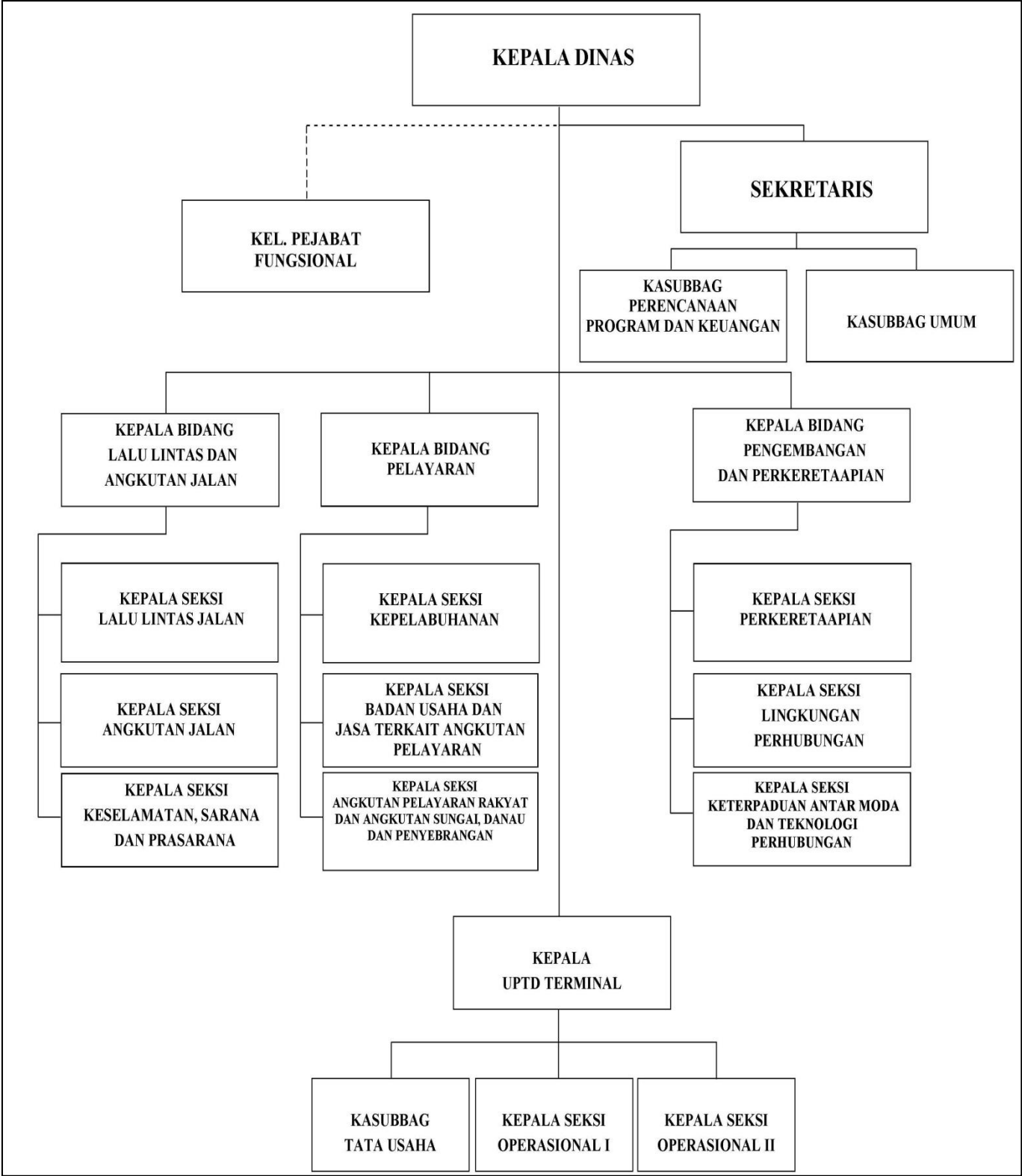
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah I di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau.
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

C) Seksi Operasional Wilayah II

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah II diKab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar);
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Gambar 2.1.Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



2.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2020 seluruhnya sebanyak 182 Orang.

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	14	7	-	22
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3	6	3	-	12
4	Bidang Pelayaran	2	5	2	-	9
5	Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	3	6	1	-	10
6	UPTD Terminal	2	11	20	-	33
7	Tenaga Non ASN	-	-	-	-	83
Jumlah		12	42	33	1	182

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishub Kaltim, Desember 2021

2.2.3 Aset yang dikelola

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Neraca Aset Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2020

No	Nama Barang	Nilai (Rp.)
	ASET TETAP	
1.	Tanah	71.295.943.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	44.227.137.813,00
3.	Gedung dan Bangunan	47.209.405.023,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.964.420.373,00
5.	Aset Tetap Lainnya	771.130.250,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.307.746.094,00
7.	ASET LAINNYA	458.700.239.481,67

Aset Dinas Perhubungan terdiri dari aset yang ada di Jembatan Timbang, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Pelabuhan Maloy serta beberapa Bandara yang akan dan telah diserahterimakan ke pihak ke-tiga (UPBU Kementerian Perhubungan).

Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

No	Jenis/Merk Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembuatan	Kondisi
A	KENDARAAN R 4			
1	Pick up/Ranger	KT 8473 B	2005	Baik
2	Double Cabin/Mitsubishi	KT 8494 B	2002	Baik
3	Minibus/Toyota Kijang	KT 1273 DZ	2003	Baik
4	Minibus/Isuzu TBR	KT 2369 BZ	2003	Baik
5	Minibus/Isuzu Touring	KT 1907 B	2003	Baik
6	Minibus/Isuzu TBR	KT 2401 BZ	2003	Baik
7	Double Cabin/Mitsubishi	KT 1902 B	2003	Baik
8	Minibus/Toyota Kijang	KT 1782 B	2003	Baik
9	Minibus/Toyota Kijang	KT 2408 BZ	2003	Baik
10	Minibus/Ford Everest	KT 1369 BZ	2004	Baik
11	Minibus/toyota avanza	KT 2758 BZ	2005	Baik
12	Minibus/Isuzu MR	KT 9100 B	2005	Baik
13	Minibus/Toyota Avanza	KT 1015 BZ	2008	Baik
14	Minibus/Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
15	Bus/Isuzu NHR	KT 9065 B	2005	Baik
16	Minibus/Suzuki APV	KT 1564 BZ	2010	Baik
17	Minibus/Toyota Kijang	KT 2790 BZ	2003	Baik
18	Jeep/Toyota Fortuner	KT 1716 BC	2011	Baik
19	Pick Up/Suzuki Mega Carry Extra	KT. 8879 BZ	2012	Baik

20	Hilux seri V	KT. 8486 BZ	2019	Baik
----	--------------	----------------	------	------

B	KENDARAAN R2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Baik
2	Sepeda Motor/Honda NF 100 D	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 D	KT 4102 MZ	2005	Baik
4	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4698 MZ	2008	Baik
5	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
6	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NC11B1C	KT 4818 MZ	2009	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3938 B	2010	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3935 B	2010	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3932 B	2010	Baik
11	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
12	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
13	Sepeda Motor/Honda NF 125 RR	KT 3245 M	2011	Baik
14	Sepeda Motor/Honda NF 100 TD	KT 4286 M	2002	Baik
15	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
16	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
17	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
18	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3432 MZ	2012	Baik
19	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
20	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
21	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
22	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
23	Sepeda Motor Honda	KT 5700 B	2020	Baik

	CRF 150L			
24	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik
25	Sepeda Motor Yamaha Matic 125	6 Unit	2021	Baik

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 19 kendaraan roda empat dan 24 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

Tabel. 2.5
Luas Bangunan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M ²)	JML LANTAI	LUAS KESELURUHAN (M ²)
1	Bangunan Induk	2,950	2	5,900
2	Gedung Koperasi	180	1	180
3	Gedung Dharma Wanita	419	1	419
4	Musholla	157	1	157
5	Kantin lama	32	1	32
6	Bangunan baru	202	2	404
	LUAS KESELURUHAN			7,092

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M².

Untuk komposisi peralatan dan perlengkapan kantor utama yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.6. Komposisi Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur**

No	Jenis Asset	Jumlah/ Satuan	Lokasi	Ket
1	Personal Komputer	75 Unit	Samarinda	
2	Printer	67 Unit	Samarinda	
3	Laptop	30 Unit	Samarinda	
4	AC	51 Unit	Samarinda	
6.	Genset	1 Unit	Samarinda	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2021

Sedangkan unit usaha di Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih operasional adalah Koperasi Panca Citra Dishub dengan kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Nomor : SK. 860/0219/KPN-Dishub/IX/2017 tanggal 11 September 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun 2013-2018 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Angka	65	67	68,00	68	68,19	68,50	68,54	70	71,16	71,50	72	74	76,60
Prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum	Angka	-4	-4	-5,45	-3.5	-5,14	-3	-4,84	-2	-4,76	-2	8,7	-2	1
Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan	%	72%	75%	75%	76%	78%	78%	80%	80%	98%	85%	98%	85%	98%
Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN	%	40%	40%	40%	50%	40%	70%	50%	80%	70%	90%	70%	90%	80%
Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih	%	65%	65%	99,94%	67%	99,88%	68%	99,19%	70%	98,33%	75%	98,50%	80%	95%

[illegible]

Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang angkutan SDP	%	10%	12%	7,31%	15%	16,27%	17%	-9,37%	20%	0,20%	5,00%	3.50%	5.00%	4.55%
Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	80%	75%	80%	80%	80%	75%	80%	80%	85%	80%	75%	80%	80%

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun Tahun Berjalan 2019-2020 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara	%	25	30	31,55	32	17	33	-	34	-	35	-
2	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	50	50	50,49	60	68,63	70	-	80	-	85	-

2.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi (2016-2020) berfungsi mengukur persepsi masyarakat Kalimantan Timur terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Timur. Metode pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi dititik beratkan pada pola layanan 7 Terminal Type B se Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan dengan variable IKM sebagai berikut :

1). Persyaratan pelayanan; 2). sistem, mekanisme dan prosedur, 3). Waktu penyelesaian, 4). Biaya/tarif, 5). Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6). Kompetensi pelaksana, 7). Perilaku pelaksana, 8). Sarana dan prasarana, 9). penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan hasil IKM pertahun sebagai berikut :

- 1). Tahun 2016 : 71,16 %
- 2). Tahun 2017 : 72,00 %
- 3). Tahun 2018 : 76,60 %
- 4). Tahun 2019 : 79.22 %
- 5). Tahun 2020 : 79.68%

Trend Indeks Layanan Transportasi cenderung mengalami peningkatan dikarenakan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan/kebijakan seiring dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Tahun 2020 variabel unsure pelayanan yang dinilai adalah persyaratan pelayanan, system mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, Biaya/tariff, produk spesifikasi jenis pelayananan.

(sumber : hasil survey SKM Dishub, 2020)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2016 s/d 2020

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	71,16	72,00	76,60	79,22	79,68

Sumber :Dishub Prov. Kaltim

Dari tabel diatas dapat diketahui Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi 140 orang dan sampel 103 orang responden secara

acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut setelah diolah data mendapatkan nilai 79,68% (B) dengan kategori Baik

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2019 s/d 2023

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	79.68	80,00	82,50	83,75

Sumber :Dishub Prov. Kaltim

2.3.3. Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian KecelakaanYang Melibatkan Angkutan Bus Umum.

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum.Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas serta 5 Kegiatan meliputi :

- 1) Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang;
- 2) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
- 3) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- 4) Pengadaan rambu – rambu lalu lintas;
- 5) Forum LLAJ.

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum.

Dalam perhitungan prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang terlibat kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 di Kalimantan Timur.

Dengan :

$$f(x) = \frac{\Delta \text{ Laka Ang Umum thn } (n-1)-n}{\sum \text{ Laka Ang Umum } (n-1)} \times 100 \%$$

f (x) : Prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum

- Δ Laka Ang umum thn (n-1) – n : Selisih jumlah kendaraan angkutan umum terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 – 2017
- Σ Laka Ang Umum thn (n – 1) : Total jumlah kendaraan angkutan umum yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018

Tabel Prosentase Kejadian Kecelakaan Angkutan Bus Umum

KENDARAAN TERLIBAT LAKA	SATUAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil Bus Umum	Unit	25	24	22	21	23	22
% Penurunan	%		-4,17	-9,09	-4,76	8,7	-2

Sumber : Data Laka Polda 2018

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum terealisasi sebesar - 2 (nilai negatif), menurun dari target yang ditetapkan sebesar -3, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum adalah sebesar 67 % atau tidak mencapai target sebesar 100 %.Beberapa upaya dilakukan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dalam menurunkan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum antara lain :

- a. Kegiatan Forum LLAJ yang bertujuan meningkatkan kinerja sektor LLAJ di Provinsi Kalimantan Timur dan membangkitkan kesadaran semua pihak bahwa terwujudnya kondisi transportasi yang aman,selamat, tertib, lancar, nyaman dan efisien merupakan tanggung jawab bersama;
- b. Pada setiap tahun diadakan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yang merupakan pendidikan dan pelatihan yang kemudian diadakan seleksi dari 40 orang peserta yang akan diikuti di pemilihan tingkat nasional dimana dari kegiatan ini diharapkan kemampuan dan pengetahuan mereka akan meningkat dan menjadi contoh bagi para sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang lain;
- c. Fasilitas dan Kelengkapan Keselamatan Jalan meupakan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Pada Tahun 2018

diadakan kegiatan pengadaan rambu – rambu lalu – lintas sebanyak 356 buah yang berlokasi di Muara Badak, Samarinda, Anggana, Kariangau dan Km.13 Balikpapan dan HM. Ardan dan CCTV berjumlah 38 Unit dengan lokasi tersebar di Kaltim

Selain dari kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum, dari data kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018, diharapkan program – program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi dan stake holder terkait dapat menunjang sasaran meningkatnya pelayanan transportasi darat dan menurunnya angka kecelakaan khususnya pada angkutan bus umum dan umumnya pada seluruh pengguna angkutan jalan di Kalimantan Timur.

Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas kendaraan di Kalimantan Timur

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Polresta Samarinda	133	120	225	170	109	96
2	Polres Balikpapan	143	140	179	132	88	47
3	Polres Bontang	40	38	76	92	55	56
4	Polres Kukar	146	145	296	152	40	77
5	Polres Kutim	91	90	59	50	34	23
6	Polres Kubar	33	30	55	48	103	22
7	Polres Berau	48	46	85	100	27	55
8	Polres Paser	59	56	149	80	71	41
9	Polres PPU	43	40	69	44	43	31
	JUMLAH	736	705	1.193	868	570	448

Sumber : Data Polda Kaltim Tahun 2020

2.3.4. Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS)

Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam penentuan jam keberangkatan dan kedatangan angkutan umum sebagaimana tercantum pada Kartu Pengawasan (KPS)

Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) kendaraan umum AKDP merupakan salah satu tupoksi Kepala Seksi Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim menetapkan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan AKDP di dalam penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai acuan bagi pengemudi dalam memberikan pelayanan tepat waktu terhadap masyarakat. Penetapan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan umum AKDP mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

1. Rata – rata waktu tempuh
2. Waktu delay akibat menaikkan dan menurunkan penumpang, hambatan samping, waktu ngetem serta kondisi kepadatan lalu – lintas pada jam tertentu.
3. Panjang lintasan jalan yang dilalui.

Pengukuran indikator prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan pada Kartu Pengawasan hanya dilakukan pada angkutan umum AKDP dengan tingkat pelayanan ekonomi sesuai dengan kewenangan penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara sampling, yaitu dengan memilih sampel beberapa trayek pada koridor pelayanan utama di Kalimantan Timur. Koridor utama pelayanan utama angkutan yang dipilih dalam mewakili Kalimantan Timur adalah :

1. Samarinda – Balikpapan
2. Samarinda – Tenggarong

3. Samarinda – Berau
4. Samarinda – Bontang
5. Samarinda – Sangatta
6. Samarinda – Kota Bangun
7. Samarinda – Melak
8. Balikpapan – Handil
9. Balikpapan – Bontang
10. Penajam – Tanah Grogot.

Dalam perhitungan prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 Km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan dilakukan dengan cara membandingkan waktu tempuh kendaraan yang tercantum pada KPS dengan standar waktu tempuh pelayanan angkutan umum di lapangan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tahun 2018 diperoleh data kecepatan rata- rata bagi kendaraan angkutan AKDP di 10 Koridor Utama pelayanan angkutan umum AKDP di Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Kecepatan Rata-Rata Angkutan Umum AKDP di Kalimantan Timur

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Jarak (Km)	Kecepatan Rata – Rata (Km/Jam)
1	Samarinda – Balikpapan	111	38,95
2	Samarinda – Tenggarong	45	30,00
3	Samarinda – Berau	575	37,1
4	Samarinda – Bontang	110	36,67
5	Samarinda – Sangatta	160	46,83
6	Samarinda - Kota Bangun	122	40,67
7	Samarinda – Melak	359	46,32
8	Balikpapan – Handil	96	48,00
9	Balikpapan – Bontang	230	46,00
10	Penajam - Tanah Grogot	138	46,00

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Berdasarkan data kecepatan rata – rata tersebut diatas, maka dikonversikan menjadi waktu tempuh rata – rata per 100 km dengan rumus sebagai berikut :

$$t_1 = \frac{d}{v}$$

Dengan :

- t₁ : Waktu tempuh riil atau lama perjalanan riil per 100 Km
- d : Jarak perjalanan atau panjang trayek (digunakan nilai 100 Km)
- v : Kecepatan rata – rata

Berdasarkan data kecepatan rata – rata tersebut maka diperoleh rata – rata waktu tempuh per 100 Km untuk kendaraan angkutan umum AKDP di Kalimantan Timur adalah sebagaimana berikut :

Waktu Tempuh per 100 Km Riil Angkutan Umum AKDP di Kaltim

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Jarak (Km)	Kecepatan Rata – Rata (Km/Jam)	Waktu Tempuh per 100 Km
1	Samarinda – Balikpapan	111	47,23	2,12
2	Samarinda – Tenggarong	45	30,00	3,33
3	Samarinda – Berau	575	33,82	2,96
4	Samarinda – Bontang	110	31,43	3,18
5	Samarinda – Sangatta	160	36,23	2,76
6	Samarinda - Kota Bangun	122	40,67	2,46
7	Samarinda – Melak	359	44,88	2,23
8	Balikpapan – Handil	96	38,40	2,60
9	Balikpapan – Bontang	230	46,00	2,17
10	Penajam - Tanah Grogot	138	46,00	2,17
Rata – Rata Waktu Tempuh Per 100 Km				2,60

Rata – rata waktu tempuh pelayanan angkutan umum AKDP di lapangan per 100 Km di Kalimantan Timur diperoleh dari tabel diatas adalah sebesar 2,60 jam atau 2 jam 36 menit.Rata – rata waktu tempuh yang tercantum pada Kartu Pengawasan di dapatkan dengan

mengurangkan jam kedatangan terhadap jam keberangkatan pada tiap rute sampel pada koridor utama pelayanan, dan diperoleh rata – rata waktu tempuh (KPS) tiap trayek sebagai berikut :

Waktu Tempuh di KPS Angkutan Umum AKDP di Kaltim

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Berangkat	Tiba	Lama Perjalanan	
				Jam : Menit	Jam
1	Samarinda – Balikpapan	5:39:00 AM	8:30:00 AM	2:51:00 0	2,85
2	Samarinda – Tenggarong	6:00:00 AM	7:30:00 AM	1:30:00	1,5
3	Samarinda – Berau	12:30:00 PM	4:00:00 AM	15:30:0 0	15,5
4	Samarinda – Bontang	7:00:00 AM	10:00:00 AM	3:00:00	3
5	Samarinda – Sangatta	8:35:00 AM	12:00:00 PM	3:25:00	3,42
6	Samarinda - Kota Bangun	6:30:00 AM	9:30:00 AM	3:00:00	3
7	Samarinda – Melak	12:45:00 PM	8:30:00 PM	7:45:00	7,75
8	Balikpapan – Handil	7:00:00 AM	9:00:00 AM	2:00:00	2
9	Balikpapan – Bontang	6:00:00 AM	11:00:00 AM	5:00:00	5
10	Penajam - Tanah Grogot	9:30:00 AM	12:30:00 PM	3:00:00	3

Setelah diperoleh data antara rata – rata waktu tempuh kendaraan berdasarkan KPS, maka dengan menggunakan fungsi jarak dapat dikonversikan waktu tempuh berdasarkan KPS menjadi waktu tempuh rata – rata per 100 Km dengan rumus berikut :

$$t_2 = \frac{tkps}{dtrayek} \times 100 \text{ Km}$$

Dengan :

t_2 : Waktu tempuh KPS atau lama perjalanan KPS per 100 Km

t_{kps} : Waktu tempuh kendaraan AKDP berdasarkan KPS

d_{trayek} : Panjang rute trayek

dengan hasil rata – rata waktu tempuh per 100 Km berdasarkan KPS adalah sebagaimana tabel berikut :

Waktu Tempuh per 100 Km di KPS Angkutan Umum AKDP di Kalimantan Timur

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Lama Perjalanan		Jarak (Km)	Kecepatan (Km/Jam)	Waktu Tempuh/ 100 Km
		Jam : Menit	Jam			
1	Samarinda – Balikpapan	2:51:000	2,85	111	38,95	2,57
2	Samarinda - Tenggarong	1:30:00	1,5	45	30,00	3,33
3	Samarinda - Berau	15:30:00	15,5	575	37,10	2,70
4	Samarinda - Bontang	3:00:00	3	110	36,67	2,73
5	Samarinda - Sangatta	3:25:00	3,42	160	46,83	2,14
6	Samarinda - Kota Bangun	3:00:00	3	122	40,67	2,46
7	Samarinda - Melak	7:45:00	7,75	359	46,32	2,16
8	Balikpapan - Handil	2:00:00	2	96	48,00	2,08
9	Balikpapan - Bontang	5:00:00	5	230	46,00	2,17
10	Penajam - Tanah Grogot	3:00:00	3	138	46,0	2,17
Rata – Rata Waktu Tempuh Per 100 Km						2,45

Setelah diperoleh data antara rata – rata waktu tempuh per 100 Km angkutan AKDP di Kalimantan Timur, maka selanjutnya dapat dilakukan perbandingan dengan rata – rata waktu tempuh riil per 100 Km dengan rumus berikut :

$$f(x) = \frac{\Delta \text{Waktu Tempuh KPS}/100 \text{ Km}}{\Delta \text{Waktu Riil Perjalanan}/100 \text{ Km}} \times 100 \%$$

Dengan :

f (x) : Prosentase kesesuaian antara waktu tempuh per 100 Km di KPS dengan waktu tempuh riil 100 Km

ΔWaktu Tempuh KPS/100 Km : Rata – rata waktu tempuh KPS atau lama perjalanan KPS per 100 Km

ΔWaktu Tempuh Riil/100 Km : Rata – rata waktu tempuh Riil atau lama perjalanan Riil per 100 Km

Rata – Rata Waktu Tempuh Berdasarkan KPS per 100 Km	Rata – Rata Waktu Tempuh Riil per 100 Km	% Kesesuaian
2,45	2,60	94 %

Indikator kinerja utama prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 Km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan terealisasi sebesar 94 % melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90 %, nilai 90 % diartikan sebagai batas normal dengan toleransi sebesar 10 %.Masih terdapatnya kerusakan jalan di beberapa ruas dan seringnya kecelakaan yang terjadi khususnya pada ruas Samarinda – Bontang dan Samarinda – Sangatta memperlambat waktu tempuh AKDP sehingga diharapkan stakeholder terkait untuk dapat memperbaiki kondisi jalan tersebut.

Capaian indikator kinerja utama prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 Km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan adalah sebesar 110,59 % tercapai.

Realisasi kesesuaian antara nilai dalam KPS terhadap nilai riil sebesar 94 % menunjukkan bahwa nilai dalam KPS masih dalam batas toleransi 20% atau kesesuaiannya lebih tinggi dari nilai 80 %. Apabila nilai kesesuaian antara KPS dan riil lebih rendah dari batas toleransi 20 %, maka menggambarkan bahwa penentuan waktu tempuh kendaraan pada Kartu Pengawasan (KPS) sudah tidak sesuai dengan

kondisi di lapangan sehingga perlu dilakukan kalkulasi ulang karena kecepatan kendaraan akan terlalu tinggi sehingga membahayakan keselamatan serta apabila kendaraan akan sampai ke terminal melebihi batas jadwal kedatangannya atau terlambat maka bus tidak akan dapat memasuki terminal karena slot waktu kedatangan telah terlewati dan menggambarkan lamanya pelayanan terhadap penumpang.

Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan belum didukung dengan kegiatan yang berbasis anggaran sehingga kedepannya perlu adanya kegiatan yang mendukung langsung IKU diatas.

2.3.5. Prosentase Kabupaten/Kota Berpredikat WTN.

Indikator Kinerja Utama Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota. Dalam perhitungan prosentase Kab/Kota berpredikat WTN dilakukan dengan membandingkan jumlah Kabupaten/Kota berpredikat WTN dilakukan dengan membandingkan jumlah Kab/Kota yang menerima penghargaan WTN terhadap jumlah seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur :

$$f(x) = \frac{\sum \text{Kab/Kota Penerima WTN}}{\sum \text{Kab/Kota di Kaltim}} \times 100 \%$$

Dengan :

f (x) : Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN

∑ Kab/Kota penerima WTN : Jumlah KabupatenKota yang menerima penghargaan WTN

∑ Kab/Kota di Kaltim : Total Jumlah KabupatenKota di Kaltim

Data jumlah Kabupaten/Kota penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha di Kalimantan Timur disajikan dalam tabel berikut ini :

Jumlah Kab/Kota Penerima WTN :

No	Jenis Penghargaan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Plakat Wahana Tata Nugraha	Kab/Kota	-	-	1	1	-	-
2	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Kab/Kota	3	3	3	5	-	-

3	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan	Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
4	Piala Wahana Tata Nugraha	Kab/Kota	1	1	1	1	7	8
5	Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya	Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kab/Kota berpredikat WTN		Kab/Kota	4	4	5	7	7	8
% Kab/Kota berpredikat WTN di Kaltim		Kab/Kota	40 %	40 %	50 %	70 %	70%	80%

Keterangan : Untuk Tahun 2017 & 2018 kegiatan WTN Tingkat Provinsi

Kab/Kota Penerima WTN Tahun 2020 Tingkat Provinsi :

JENIS PENGHARGAAN	KAB/KOTA PENERIMA WTN TAHUN 2018
Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Bontang 4. Kukar 5. Penajam Paser Utara 6. Paser 7. Berau

Pelaksanaan sosialisasi untuk 10 (sepuluh) Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur sudah terlaksana secara keseluruhan dan jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti penilaian dan untuk menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi adalah 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota atau sebesar 100 % dilihat dari pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020.

Predikat WTN merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan di wilayah Kab/Kota, penilaian WTN meliputi sarana angkutan umum, prasarana lalu lintas, pelayanan masyarakat, komitmen daerah, perencanaan transportasi, pendanaan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Berbagai upaya penataan transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan di lakukan Kab/Kota yang secara umum turut mendukung peran Provinsi dalam melakukan pembinaan transportasi di daerah. Beberapa kegiatan diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi di Kab/Kota :

- a. Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan se-Kalimantan Timur diselenggarakan setiap tahun sebagai tempat koordinasi, konsultasi dan solusi Dinas Perhubungan Kab/Kota, Dinas Perhubungan Provinsi, Kementerian Perhubungan beserta UPT dan

Satker-nya dan juga Stakeholder terkait (BUMN dan Perusahaan transpotasi) ;

- b. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan yaitu berupa pemilihan pelajar pelopor keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan peringkat 1 – 3 adalah Farhani SMAN 4 Balikpapan, Maulanda Naldiansyah SMAN 3 Tenggarong, dan Ananda Bayu Saputra MAN 1 Samarinda;
- c. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan kegiatan sosialisasi terhadap 10 Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur dengan kegiatan intinya yaitu penyelenggaraan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) dan razia gabungan kendaraan angkutan di jalan Provinsiserta diadakannya kegiatan Rampcek bagi kendaraan Umum (bus) pada Terminal Tipe B.enilaian WTN dalam tingkat Provinsi dengan sebelumnya memberikan sosialisasi terhadap 10 Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur.

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Indikator Kinerja	Program Pendukung
Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN	1. ProgramPeningkatan Pelayanan Angkutan <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja sasaran II masih perlu adanya inovasi yang dapat secara langsung menunjang target pencapaian indikator kinerja khususnya pada kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan yang tidak hanya sampai pada pemilihan pelajar pelopor tingkat nasional dimana pembinaan terhadap pelajar mengenai tertib lalu lintas harus disosialisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga pelajar merasa bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan faktor penting dalam keseharian mereka dalam beraktifitas.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Meningatnya Ketertiban Lalu Lintas di Kalimantan Timur	80 %	97,7 %	81,88 %

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja kurang dari 100% atau di 81,88% dikarenakan tidak ikutnya Kab/Kota khususnya Kab. Kutai Barat dan Kab. Mahulu dalam penilaian Piala Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi Kaltim, dengan pembinaan dan kesiapan dari seluruh Kab/Kota untuk dapat ikut dalam penilaian Piala Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi Kaltim diharapkan target indikator kinerja dapat tercapai.

Sasaran II yaitu Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas di Kalimantan Timur juga mempunyai tingkat efisiensi yang kurang dari 100 %, indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN sangat tergantung pada pelaksanaan di tingkat nasional dan kesiapan Kab/Kota untuk mengikuti penilaian WTN, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna transportasi diharapkan berpengaruh langsung kepada perbaikan indikator sasaran ini sehingga kesadaran untuk tertib dan keselamatan berkendara di jalan menjadi pola hidup masyarakat.

2.3.6. Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Berkompetensi Teknis

Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Berkompetensi Teknis, merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur pengembangan kemampuan SDM yang berkompetensi teknis di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan sektor perhubungan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Data Kebutuhan SDM Berkompentensi Teknis Tahun 2018:

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Kebutuhan ASN (Orang)	Keterangan
1	Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	8	STAN/Kemenkeu
2	Kehumasan & Keterbukaan Informasi Publik	2	Kominfo
3	Kearsipan	2	Badan Arsip
4	Perencanaan	2	Bappenas
5	Andalalin	3	Kemenhub
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	2	Kemenhub
7	Teknik Transportasi	13	Kemenhub
8	Amdal	4	Universitas/Lembaga Diklat
9	Pengukuran Kapal	2	Kemenhub
10	Operasional Terminal	4	Kemenhub
11	Perkeretaapian	2	Kemenhub
12	Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	2	Kemenhub
13	Pemrogaman dan Management Jaringan	2	Kominfo/Lembaga Diklat
14	Keteknisan Ilmu Pelayaran	4	Kemnhub
15	PPNS	4	Kemenhub
16	Diklat Revolusi Mental	23	Badan Diklat
17	Diklat Bimtek Tata Upacara Sipil	2	Badan Diklat
18	Diklat Teknis Dasar – Dasar Kesyahbandaran	6	BP2TL
19	Human Factor	1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII Dirjen Phb. Udara
20	Safety Management System	1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII Dirjen Phb. Udara
Jumlah		88	

Sumber : Subbag Umum Dinas Perhubungan Kaltim 2018

Untuk SDM Dinas Perubungan Prov. Kaltim yang telah mempunyai kompetensi teknis adalah sebagai berikut :

Data Ketersediaan SDM yang Berkompetensi Teknis

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	ASN Dishub (Orang)	Keterangan
1	Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	0	STAN/Kemenkeu
2	Kehumasan & Keterbukaan Informasi Publik	0	-
3	Kearsipan	3	Anwardini Parno Dwi Ermayani
4	Perencanaan	3	Andik Wahyudi, ST, MT Achmad Zakki Mubarrok, ST M. Rayani, S. SiT
5	Penilia Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	4	H. Andik Wahyudi, ST, MM Jaka Purwa Indarta, S. SiT, MT Ary Nugraha, SE M. Rayani, SSit
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	1	M. Yuni Hadi Sutopo, SE
7	Teknik Transportasi	3	M. Yuni Hadi Sutopo, SE M. Rayani, S. SiT Arry Nugroho, SE
8	Amdal B	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
9	Pengukuran Kapal (Sertifikasi & Registrasi Kapal)	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
10	Operasional Terminal	0	-
11	Perkeretaapian	1	H. M. Yusuf
12	Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	3	H. Andik Wahyudi, ST, MM M. Rayani, S. SiT Rudianto L., S.T.
13	Pemrograman dan Management Jaringan	1	Hendrayana, AMD
14	Keteknisan Ilmu Pelayaran	0	-
15	PPNS	8	Ary Nugraha, SE Yuni Hadi Saputra, SE Rudianto Lumbantoruan, ST Royan Hargi Saputra, ST Maryudi Utomo, ST Achmad Zaki Mubarok, ST Monica Uli Gultom, SH M. Fachrial, S.Kom
16	Diklat Bimtek Tata Upacara Sipil	2	M. Rayani M. Yuni Hadi Hadi Sutopo
17	Diklat Revolusi Mental	4	H. Suyatno, SE H. Andik Wahyudi H. Anif Fakhruddin, ST Jaka P Indarta, S. SiT., MT

18	Diklat Teknis Dasar – Dasar Kesyahbandaran	4	Rudianto L, ST Endang Saputro Arisandy Ade Astuty,SE Lusi Agustini
19	Petugas Keselamatan ASDP	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
20	Ekonomi Lingkungan	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
21	Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
19	Human Factor	0	-
20	Safety Management System	1	Maryudi Utomo, ST
Jumlah		43	Pegawai Negeri Sipil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi teknis masih belum merata di lingkup Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Indikator Presentase Peningkatan Jumlah SDM yang Berkompetensi Teknis didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Rendahnya capaian antara lain disebabkan :

1. Belum adanya pemetaan kebutuhan dan ketersediaan SDM terkait kompetensi teknis;
2. Koordinasi dengan pihak penyelenggaraan pendidikan yang terlambat;
3. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti pendidikan dikarenakan tugas – tugas pokok yang sulit untuk ditinggalkan;
4. Bimtek lebih diminati daripada Diklat dikarenakan waktu yang lebih singkat.

Untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkompetensi Teknis, Sekretariat khususnya Subag Kepegawaian diharapkan berperan aktif dalam pemetaan dan ketersediaan SDM terkait kompetensi teknis dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggaraan pendidikan sehingga target capaian Indikator Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Berkompetensi Teknis dapat tercapai.

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Indikator Kinerja	Program Pendukung
1. Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja sasaran III sudah cukup baik dan sesuai hanya diperlukan perbaikan pada tahapan pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah disusun sehingga capaian kinerja dan daya serap anggaran menjadi lebih baik.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis	71,88 %	88,94 %	80,82 %

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja kurang dari 100% atau di 80,82% dimana capaian kinerja selaras dengan capaian penyerapan anggaran yang masih di bawah 90%, serapan anggaran program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur masih rendah di 53,23% dikarenakan anggaran untuk diklat PPNS tidak dapat terlaksana. Diklat PPNS baru dapat terlaksana pada tahun 2019, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti sebanyak 11 orang.

2.3.7. Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan:

- 1. Prosentase Ketersediaan Terminal Tipe B
- 2. Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut
- 3. Prosentase Ketersediaan Bandar Udara
- 4. Prosentase Ketersediaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	100	100	100
2	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	100	100	100
3	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	100	100	100
4	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	100	100	100

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016 :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	% Penurunan/ Peningkatan Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{(6-5/5 \times 100\%)}$
1	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	-	87,5	100	14,28%
2	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	-	100	100	0%
3	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	-	88,34	100	11,66%
4	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%		93,75	100	6,25%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

No.	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD/RENS TRA	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	100	100	100
2	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	100	100	100
3	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	100	100	100
4	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	100	100	100

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Indikator Kinerja VII (Prosentase ketersediaan terminal tipe B) :

Indikator Kinerja Utama Prosentase ketersediaan terminal tipe B, merupakan indikator yang digunakan dalam upaya peningkatan infrastruktur perhubungan yang berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan transportasi massal.

Terminal tipe B sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 adalah dalam kewenangan Pemerintah Provinsi, pada Tahun 2016 persiapan serah terima/P3D antara Pemerintah Kabupaten/Kota di Prov. Kaltim dengan Pemprov Kaltim mulai dilakukan, pembentukan struktur organisasi baru di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017 dimana dibentuk satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal. Terminal Tipe B yang akan dikelola oleh UPTD Terminal Dishub Prov. Kaltim adalah Terminal Sungai Kunjang Samarinda, Terminal Lempake Samarinda, Terminal Timbau Kutai Kertanegara, Terminal Bontang, Terminal Sangatta, Terminal Paser dan Terminal Berau.

Dalam perhitungan Prosentase ketersediaan terminal tipe B adalah dengan ketersediaan terminal tipe B di 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini guna menunjang akses mobilitas masyarakat yang bertujuan dalam pelayanan dasar terhadap masyarakat di bidang transportasi merupakan hal yang harus diperhatikan.

Jumlah Terminal Tipe B yang ada di Provinsi Kalimantan Timur

No	KabupatenKota	Terminal Tipe B	Keterangan
1	Samarinda	2	1. Terminal Sungai Kunjang 2. Terminal Lempake
2	Balikpapan	-	-
3	Bontang	1	Terminal Bontang
4	Paser	1	Terminal Tepian Batang
5	Penajam Paser Utara	-	-
6	Kutai Kartanegara	1	Terminal Timbau
7	Kutai Timur	1	Terminal Sangatta

8	Kutai Barat	-	-
9	Berau	1	Terminal Rinding
10	Mahakam Ulu	-	-
	Jumlah	7	Terminal Tipe B

Sumber : UPTD Terminal Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada Kab/Kota di Kalimantan Timur yang masih belum memiliki Terminal Tipe B yaitu : Kab. Penajam Paser Utara, Kab Kutai Barat dan Kab Mahakam Ulu. Faktor alasan yang memicu belum tersedianya Terminal Tipe B pada Kab/Kota tersebut adalah :

1. Kabupaten Penajam Paser Utara, masih belum tersedianya lokasi, namun dalam hal ini terminal yang sudah ada memiliki pola layanan AKDP yang secara aset dan kelayakan belum ada pelimpahan wewenang kepada Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kutai Barat, belum tersedianya lokasi.
3. Kabupaten Mahakam Ulu, masih terhambat oleh akses transportasi darat yang tidak memadai dan penentuan lokasi yang belum dtentukan.

2. Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut

Jumlah Pelabuhan Laut di Kalimantan Timur yang menunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim dan Capaian Kinerja RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut :

No	KabupatenKota	Jumlah	Fungsi dan Hirarki Pelayanan
1	KotaSamarinda : a. Pelabuhan Samarinda b. Terminal Peti Kemas Palaran	1	Pelabuhan Pengumpul dan 1 Terminal Peti Kemas
2	KotaBalikpapan : a. Pelabuhan Semayang b. Terminal Peti Kemas Kariangau	1	Pelabuhan Utama dan 1 Terminal Peti Kemas
3	KotaBontang : a. Pelabuhan Lok Tuan b. Pelabuhan Tanjung Laut	2	Pelabuhan Pengumpul
4	KabupatenPaser : a. Pelabuhan Teluk Adang Pondong	1	Pelabuhan Pengumpul
5	KabupatenPenajam	1	Pelabuhan Pengumpul

	Paser Utara : a. Pelabuhan Penajam		
6	Kab. Kutai Kartanegara : a. Pelabuhan Kuala Samboja b. Pelabuhan Marangkayu	2	Pelabuhan Pengumpul
7	Kabupaten Kutai Timur : a. Pelabuhan Kenyamukan b. Pelabuhan Maloy c. Pelabuhan Sangkulirang	3	Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional
8	Kabupaten Berau : a. Pelabuhan Tanjung Redeb b. Pelabuhan Mantaritip	2	Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional
9	Kabupaten Kutai Barat	-	-
10	Kabupaten Mahulu	-	-
	Jumlah	13	

Sumber : Kepmen Perhubungan No. 432 Tahun 2017

Pembangunan Pelabuhan dengan sumber APBD Kaltim Tahun 2013 – 2018 diprioritaskan pada penyelesaian pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Teluk Golok Kabupaten Kutai Timur.

Indikator Kinerja Utama Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut, merupakan indikator yang digunakan dalam upaya peningkatan infrastruktur perhubungan di KEK Maloy yaitu sisi darat dari Pelabuhan Laut Maloy dimana sampai dengan tahun 2017 telah terbangun fasilitas sisi darat berupa bangunan kantor pelabuhan dan penunjangnya dan yang telah dikerjakan pada tahun 2017 yaitu jalan akses yang menghubungkan dermaga dan trestle yang telah dibangun dengan APBN dengan sisi darat dan target sampai dengan akhir RENSTRA 2013 – 2018 adalah menyempurnakan jalan akses tersebut dengan membangun Abutment pada sambungan trestle dan causeway/jalan pendekat.

Kegiatan tahun 2018 berupa Pekerjaan pembangunan Abutment di causeway fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,56 %, seperti tabel dibawah.

Tabel 3.2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Kegiatan Tahun 2018	Target Sasaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur (Pekerjaan pembangunan Abutment di causeway Pelabuhan Maloy)	100 %	100 %	98,56%

Sumber Data : Dokumen Monev Dishub Prov Kaltim Tahun 2018

Dalam perhitungan Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut dilakukan dengan menggunakan jumlah ketersediaan fasilitas atau prasarana di Pelabuhan Laut Maloy yang harus tersedia.

Dari data diatas target 100 % berupa bangunan kantor dan penunjangnya beserta jalan akses ke trestle dan abutmentnya dapat dicapai pada tahun 2018. Sisi Laut telah disempurnakan oleh Kementerian Perhubungan dengan membangun 4 segmen dermaga dari 2 segmen yang telah terbangun pada tahun 2018 dan pada sisi kawasan untuk segera membangun fasilitas tangki timbun sehingga Pelabuhan Laut Maloy dapat segera berfungsi.

3. Prosentase Ketersediaan Bandara Udara

Jumlah Bandar Udara Laut di Kalimantan Timur yang menunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim dan Capaian Kinerja RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut (sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional dan Rencana Induk Bandar Udara Nasional):

No	KabupatenKota	Jumlah	Fungsi dan Hirarki Pelayanan
1	Kota Samarinda : Bandar Udara APT Pranoto Samarinda	1	Pengumpan Skala Sekunder (PS)
2	Kota Balikpapan : Bandar Udara Sepinggan Balikpapan	1	Pengumpan Skala Primer (PP)
3	Kota Bontang : Bandar Udara LNG Bontang	1	Pengumpan Skala Tersier (PT)
4	Kabupaten Paser : Bandar Udara Paser	1	Pengumpan

5	Kab. Kutai Kartanegara Bandara Kota Bangun	1	Pengumpan
6	Kabupaten Kutai Timur : a. Bandar Udara Muara Wahau b. Bandar Udara Tanjung Bara	2	Pengumpan
8	Kabupaten Berau : a. Bandara Kalimarau b. Bandara Maratua	2	Pengumpan Skala Tersier (PT) Pengumpan
9	Kabupaten Kutai Barat : Bandara Melalan	1	Pengumpan
10	Kabupaten Mahulu : Bandara Datah Dawai	1	Pengumpan
	Jumlah	11	

Sumber : Kepmen Perhubungan No. 69 Tahun 2013

Melihat kondisi geografis Kalimantan Timur dimana akses darat ke daerah terpencil dan jarak tempuh yang cukup lama dan berbahaya menjadi kendala dalam pembangunan Kab/Kota di Kalimantan Timur, maka transportasi udara merupakan salah satu moda yang sangat penting untuk dikembangkan. Pembangunan bandara baru untuk memenuhi pelayanan transportasi udara bagi masyarakat Kaltim sangat dibutuhkan, pembangunan bandara baru dilakukan jika bandara yang ada sudah tidak dapat dikembangkan lagi untuk memenuhi pertumbuhan penumpang yang terus berkembang dan aspek keselamatan penerbangan yang harus dipenuhi.

Prosentase pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur pada 5 (lima) Tahun terakhir ini juga semakin bertambah pesat dan kebutuhan transportasi udara perlu dikembangkan guna terlaksananya kemudahan mobilitas penduduk yang ada di Kalimantan Timur khususnya pada wilayah-wilayah terpencil.

Program dan kegiatan ketersediaan Bandar Udara Tahun 2018

No	Kegiatan Tahun 2018	Target Sasaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	100 %	100 %	87,88 %

Sumber: Dokumen Monev Dishub Kaltim 2018

Tabel diatas menunjukan bahwa kegiatan Pembangunan ketersediaan Bandar Udara yang ada di Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik, dengan berakhirnya RPJMD Tahun 2013-2018 dengan diakhiri oleh Pembangunan Bandar Udara APT. Pranoto (Bandara Samarinda Baru) di Kota Samarinda yang langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo pada Tanggal 25 Oktober Tahun 2018.

4. Indikator Kinerja X (Prosentase Ketersediaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan)

Indikator Kinerja Utama ketersediaan Dermaga SDP, merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur peningkatan pelayanan angkutan SDP. Pada tahun 2018 ditetapkan kegiatan prioritas sektor SDP adalah meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, melaksanakan kegiatan rampchek terhadap kapal yang beroperasi yang laik layar dan fasilitas keselamatan yang ada di dermaga maupun di kapal. Pada Tahun 2018 tidak diadakannya pembangunan maupun kegiatan rehabilitasi pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau namun kegiatan pengawasan, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pelayaran tetap dilaksanakan dengan baik. Dermaga sungai dan pelabuhan penyeberangan yang secara hirarki melayani antar Kab/Kota di Kaltim

No	KabupatenKota	Jumlah	Fungsi dan Hirarki Pelayanan
1	Kota Samarinda : Dermaga Sei Kunjang	1	Lintas Kabupaten
2	Kota Balikpapan : Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Dermaga Kampung Baru	2	Lintas Kabupaten
3	Kab. PPU Pelabuhan penyeberangan Penajam Dermaga Penajam	2	Lintas Kabupaten
4	Kabupaten Paser : Dermaga Kendilo	1	Lintas Kabupaten
5	Kab. Kutai Kartanegara Dermaga Tenggarong Dermaga Kota Bangun Dermaga Tabang Dermaga Muara Pahu	4	Lintas Kabupaten
6	Kabupaten Kutai Barat : Dermaga Melak Dermaga Tering	2	Lintas Kabupaten

7	Kabupaten Mahulu : Dermaga Batu Dinding Dermaga Long Bagun Dermaga Long Pahangai Dermaga Long Apari	1	Pengumpan
	Jumlah	11	

Sumber : Bidang Pelayaran, 2018

Sedangkan untuk Kegiatan tahun 2019 yang merupakan pekerjaan fisik dan pengawasan antara lain:

No	Kegiatan Tahun 2019	Target Sasaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Pembangunan Bollard Dermaga Penyeberangan Kariangau	100%	100%	91%
2	Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya (Pelabuhan Kariangau)	100%	27.3%	20%
3	Pengawas Pembangunan Bollard Dermaga Penyeberangan Kariangau	100%	100%	96%
4	Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya (Pelabuhan Kariangau)	100%	100%	93%

Sumber Data : Dokumen Monev Dishub Prov Kaltim Tahun 2019

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Indikator Kinerja	Program Pendukung
1. Prosentase ketersediaan terminal tipe B 2. Prosentase ketersediaan pelabuhan laut. 3. Prosentase Ketersediaan Bandar Udara 4. Prosentase Ketersediaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	1. Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja sasaran IV sudah cukup baik dan sesuai hanya diperlukan perbaikan pada tahapan pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah disusun sehingga capaian kinerja dan daya serap anggaran menjadi lebih baik.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Prosentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	100 %	87,95 %	113,7 %

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja sudah cukup baik, sasaran Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan merupakan kegiatan pembangunan fisik infrastruktur bidang perhubungan yang didominasi oleh kegiatan pembangunan Bandara Samarinda Baru dan pembangunan Pelabuhan Laut Maloy, kedua kegiatan tersebut telah selesai 100% dan untuk Bandara Samarinda Baru atau Bandara APT. Pranoto telah beroperasi dengan baik.

Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan mempunyai tingkat efisiensi dapat dikatakan cukup baik, koordinasi bersama stakeholder terkait dalam menyelesaikan program pembangunan agar dapat selalu ditingkatkan sehingga permasalahan di lapangan tidak menghambat proses pembangunan.

Tabel 2.3 menjelaskan bahwa sasaran indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada Tahun 2013 – 2018 mengalami satu kali perubahan (revisi) dimana pada Tahun 2013 – 2016 memiliki sasaran: "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur", Sedangkan pada Tahun 2016 – 2018 memiliki 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas di Kalimantan Timur;
3. Meningkatnya Pemenuhan Standar SDM Teknis Perhubungan;
4. Meningkatnya Jumlah Penumpang yang Terlayani.

Dari hal tersebut diatas, dengan demikian Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kaltim secara garis besar memiliki pencapaian target setiap tahunnya dan mengalami peningkatan yang signifikan dengan menyesuaikan sasaran yang tertuang dalam Renstra 2013 – 2018, namun

masih ada beberapa uraian indikator kinerja yang belum mencapai target seperti :

1. Prosentase peningkatan jumlah SDM yang berkompetensi teknis realisasi 35%, hal ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 80%;
2. Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN memiliki realisasi 80% sedangkan target yang ditentukan adalah 90 % karena masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti kegiatan ini;
3. Prosentase ketersediaan terminal tipe B mempunyai realisasi 75% sedangkan target yang ditetapkan adalah 85%, hal ini terjadi dikarenakan masih ada Kab/Kota yang belum memiliki terminal tipe B yang aktif (implementasi Undang Undang 23 Tahun 2014).

Hambatan – hambatan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain adalah :

1. Belum adanya pemetaan kebutuhan dan ketersediaan SDM terkait kompetensi teknis, Koordinasi dengan pihak penyelenggaraan pendidikan yang terlambat;
2. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti Diklat Teknis dikarenakan tugas – tugas pokok yang sulit untuk ditinggalkan;
3. Komposisi jumlah ASN dengan bidang tugasnya tidak sebanding. Hal ini dikarenakan rendahnya rekrutment ASN sesuai dengan kompetensi;
4. Penilaian WTN oleh Kementrian Perhubungan dilaksanakan 2 tahun sekali sehingga saat tidak ada pelaksanaan WTN oleh Kementerian Perhubungan, Dishub Prov. Kaltim mengambil inisiatif untuk tetap melakukan penilaian kriteria WTN terhadap Kab/Kota dengan harapan bahwa Kab/Kota dapat terpacu untuk menindaklanjuti rekomendasi penilaian tersebut untuk meningkatkan kawasan tertib lalu – lintas di Kab/Kota yang selama ini belum menjadi target dari Kab/Kota;
5. Lambatnya proses serah terima P3D Pengelolaan terminal tipe B Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi;
6. Minimnya prasarana fasilitas Terminal Type B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi;
7. Masih terdapat 2 Kabupaten yang sampai saat ini belum melakukan serah terima pelimpahan P3D tentang pengelolaan terminal type B yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat.

Resume hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Renstra 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Terbangun dan beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dengan panjang landasan 2.250 m x 45 m;
- b. Terbangun dan beroperasinya Bandar Udara Maratua Kab. Berau dengan panjang landasan 1.650 m x 35 m;
- c. Terbangunnya pelabuhan laut internasional Maloy Teluk dengan fasilitas darat dan laut berupa trestle panjang 750 m dan 4 dermaga dengan fungsi layanan Pelabuhan Pengumpul Multipurpose. Ditargetkan akhir Desember 2019 pelabuhan beroperasi;
- d. Menurunnya angka kecelakaan/fatalitas di jalan sebesar 15 %;
- e. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat pemakai jasa perhubungan di Kalimantan Timur baik pelajar, awak angkutan umum dan masyarakat;
- f. Meningkatnya Retribusi PAD Sektor Perhubungan sebesar 10 % meliputi jasa perizinan sektor darat, pelabuhan penyeberangan, dan jasa terminal;
- g. Tumbuh kembangnya tingkat disiplin ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dengan mengacu dan mempedomani Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
- h. Dengan pola kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Alokasi Anggaran APBN telah dapat menumbuhkan berkembang perekonomian makro (PDRB) melalui sektor jasa perhubungan.

2.3.8. Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi (Sasaran Strategis I RENSTRA 2019 – 2023)

Pergerakan sarana transportasi yang ada pada wilayah Kalimantan Timur Tahun 2021 mengalami sedikit perbaikan dari tahun 2020, baik transportasi darat, laut maupun udara hal ini dikarenakan kebijakan PPKM pada sektor transportasi yang dampaknya secara signifikan meningkatkan Pergerakan Sarana Transportasi dan adanya peraturan/kebijakan protokol kesehatan di Transportasi Umum jumlah pergerakan sarana pun masih meningkat terbatas. Hal demikian dapat dilihat dari realisasi capaian persentase pergerakan sarana transportasi yang berkurang hampir 40% target capaian yang ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	33	20	60,61

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	$7=((6/4)-1)*100$
1.	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	31.55%	17%	20%	-17,65%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pergerakan sarana transportasi mengalami peningkatan dari tahun 2020, yang disebabkan Kebijakan PPKM Pandemi COVID-19.

I. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis I (Pertama)

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2021 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Pelabuhan Kariangau
- Pembinaan Badan usaha
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Terminal Tipe B) memiliki Nilai 79.68 dengan kategori Baik.

3. Pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 memaksa untuk adanya pembatasan ketat sektor transportasi sehingga sektor transportasi terkena dampak yang cukup besar pada tahun 2020, pemberlakuan Protokol Kesehatan yang ketat menjadi keharusan dalam upaya meningkatkan kembali sektor transportasi di Kalimantan Timur, walaupun sudah ada pergerakan yang cukup baik akan tetapi belum dapat meningkatkan kembali sektor transportasi ke target yang direncanakan.

II. Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi.

1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum)
3. Melakukan pengintegrasian antar stake holder perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam untuk meningkatkan ekonomi Kaltim;
4. Pemberlakuan dan sosialisasi yang rutin tentang Protokol Kesehatan yang ketat di semua sektor transportasi.

III. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program Pembangunan Prasarana transportasi laut dan ASDP

1. Kegiatan Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
2. Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat
3. Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran

b. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda

c. Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B :

1. Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I
2. Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Pengelolaan Pelayaran		Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	85	83	98%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASD	Izin	200	250	125%	Kasi Angkutan Pelra & ASDP	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	50	75	150%	Kasi Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran	APBD
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	%	95	88.017	93%	Kasi Kepelabuhan	APBD
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	%	81	81	100%	Kasi Kepelabuhan	APBD
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	0	20	20%	Kabid Pengembangan & Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api	Penetapan	0	0	0%	Kasi Perkeretaapian	APBD
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	512	418	82%	Kabid LLAJ	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	650000	301083	46%	Kepala UPTD Terminal	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	Perencanaan	2	2	100%	Kasi Lingkungan Perhubungan	APBD
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	Penetapan	1	1	100%	Kasi Keterpaduan Antar Moda	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksebilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	60,61	64,64	-4,03

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai -4,03%.

2.3.9. Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Sasaran Strategis II RENSTRA 2019-2023)

Hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 127,8% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2019 – 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	Persentase (%)	70	89,49	127,8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6=((5/4)-1)*100
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	68,63%	89,49%	30,39%

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis II (Kedua)

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor / Rampcheck (Angkutan Orang dan Barang).

Kendaraan yang Diperiksa	Tahun			
	Awal 2019	2020	2021	Akhir RPJMD
Angkutan Umum	86	116	203	250
Angkutan Barang	379	379	385	400
Jumlah	465	495	588	650
Persentase			90,46%	

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampchek (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 203 kendaraan jenis angkutan umum. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 kegiatan rampcheck tidak dilakukan secara maksimal karena adanya Pandemi Covid-19 dan pada Tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan. Diketahui hasil kendaraan yang telah di rampcheck pada Tahun 2021 berjumlah

203 kendaraan dan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 90,46%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselaan jalan yang terpasang pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Jenis Prasarana	Tahun				
	Awal 2019	2020	2021	Jumlah Terpasang Data Awal +2020+ 2021	Akhir RPJMD (2023)
Rambu	3.155	1.333	1.392	5.880	16.000
Marka	20.6885	42.250	42.500	291.635	2.237.725
Pagar	3.428	1.000	1.200	5.628	89.509
LPJU	0	10	25	35	235
Persentase	10.93%			14.71%	100%

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2021 untuk rambu berjumlah 1.392 unit, Marka jalan 42.500 m²,pagar pengaman 1.000 m dan LPJU 10 unit. Sehingga jika disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) mencapai 14.71%.

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

PRASARANA TERMINAL	TAHUN
	2020
Batu Ampar	83
Sungai Kunjang	83
Lempake	83
Timbau	77
Penajam	62
Paser	58
Bontang	62
Sangatta	45
Berau	68
Persentase	69%

4. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata angka kasus laka lantas di beberapa Kab/Kota mengalami penurunan kecuali di Kota Bontang, Kab. Kukar dan Kab. Berau.

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Polresta Samarinda	133	120	225	170	109	96	87
2	Polres Balikpapan	143	140	179	132	88	47	56
3	Polres Bontang	40	38	76	92	55	56	31
4	Polres Kukar	146	145	296	152	40	77	78
5	Polres Kutim	91	90	59	50	34	23	19
6	Polres Kubar	33	30	55	48	103	22	29
7	Polres Berau	48	46	85	100	27	55	23
8	Polres Paser	59	56	149	80	71	41	53
9	Polres PPU	43	40	69	44	43	31	42
	JUMLAH	736	705	1.193	868	570	448	418

I. Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan.

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

- 2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten.
- 3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui :
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN;
 - b) mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat.

II. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan :

- 1. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan
- 2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan
- 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	512	418	82%	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	60	60	100%	Kasi Lalu Lintas Jalan	APBD
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	55	41.25	75%	Kasi Keselamatan, Sarana & Prasarana	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	Izin	24	50	208%	Kasi Angkutan Jalan	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	Izin	10	20	200%	Kasi Angkutan Jalan	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	127,8	87,43	40,37

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 40,37 %.

2.3.10 Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2021 secara signifikan menurun khususnya jumlah penumpang dikarenakan Pandemi COVID-19.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	4.500.000 Orang dan 307.000.000 Ton	4.677.228 Orang dan 323.233.820 Ton

2.3.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, pada level program selanjutnya, kinerja dinas di analisa pengelolaan pendanaan pelayanan dinas melalui Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. (TC.24)
Anggaran dan Reaslisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (2013 – 2018)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,484,058,000	4,133,450,000	7,155,655,000	7,472,556,571	3,246,035,000	3,674,985,000	3,916,217,841	3,743,158,790	5,773,264,896	6,846,289,681	2,878,596,372	3,404,477,309	87.34%	90.56%	80.68%	91.62%	88.68%	92.64%	-2.68%	-1.93%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,382,585,300	1,705,250,000	16,135,543,000	10,389,425,000	745,350,000	1,697,850,000	2,226,605,413	1,619,251,140	14,706,519,413	9,934,725,872	731,972,212	1,656,230,050	93.45%	94.96%	91.14%	95.62%	98.21%	97.55%	-2.07%	-1.85%
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah					2,294,685,000	2,159,189,000					2,191,181,859	1,962,320,333					95.49%	90.88%	-3.04%	-5.51%
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan					4,500,000						4,472,500						99.39%			
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	173,250,000	302,200,000	354,800,000	345,700,000			171,913,500	294,321,700	354,211,640	336,711,000			99.23%	97.39%	99.83%	97.40%			14.66%	14.24%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	375,000,000	480,000,000	864,200,000	1,219,000,000			324,825,400	330,751,800	425,473,850	1,091,664,176			86.62%	68.91%	49.23%	89.55%			28.73%	35.29%
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	235,000,000	339,850,000	102,000,000				215,000,000	275,100,000	101,962,000				91.49%	80.95%	99.96%				-19.65%	-19.09%
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,304,090,000	3,427,331,250	9,170,250,000		1,188,650,000	162,346,000	2,748,204,520	2,934,562,157	4,216,038,920		1,068,456,335	159,548,639	83.18%	85.62%	45.98%		89.89%	98.28%	-18.21%	-23.27%
8	Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	200,000,000	200,000,000	161,690,000				150,893,550	198,353,550	161,402,000				75.45%	99.18%	99.82%				-6.82%	-29.55%
9	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,039,400,000	8,296,050,000	937,800,000	847,472,100	643,700,000	1,082,700,000	900,201,100	8,033,889,206	779,783,300	653,080,200	604,977,700	1,039,260,197	86.61%	96.84%	83.15%	77.06%	93.98%	95.99%	0.34%	1.16%
10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	814,200,000	1,059,000,000	1,466,140,000	919,000,000			754,680,000	949,600,000	1,296,700,000	779,930,000			92.69%	89.67%	88.44%	84.87%			2.46%	0.67%
11	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan	715,235,573,103	205,825,876,134		7,260,481,300			650,584,475,942	187,861,259,806		6,893,651,925			90.96%	91.27%		94.95%			-76.26%	-76.15%
12	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6,905,298,366	9,000,000,000	6,586,633,890	4,050,380,549	637,700,000	8,003,559,000	6,187,306,350	8,175,702,700	4,469,328,950	3,940,823,300	587,307,000	7,999,833,824	89.60%	90.84%	67.85%	97.30%	92.10%	99.95%	3.12%	5.78%
13	Program Peningkatan SDM Perhubungan			2,102,987,000	2,382,287,000	1,264,180,000	3,247,951,000			1,648,951,000	1,952,975,000	1,194,875,000	3,000,315,950			78.41%	81.98%	94.52%	92.38%	12.73%	38.48%
14	Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP			234,874,286,310	208,672,252,150	321,955,684,236.80	110,247,793,000			227,418,955,847	200,858,629,166	310,837,537,128.80	96,968,723,146			96.83%	96.26%	96.55%	87.96%	-14.23%	11.60%
15	Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Transportasi Darat, Sungai, Danau dan Penyeberangan			1,000,000,000						885,018,000						88.50%					
16	Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Transportasi Udara			20,000,000,000	13,392,945,000					19,576,773,835	13,280,348,900					97.88%	99.16%			-19.79%	-19.16%
	Jumlah	735,148,454,769	234,769,007,384	300,911,985,200	256,951,499,670	331,980,484,236.80	130,276,373,000	668,180,323,616	214,415,960,849	281,814,383,651	246,568,829,220	320,099,376,106.80	116,190,709,448	90.89%	91.33%	93.65%	95.96%	96.42%	89.19%	-30.40%	-29.88%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (2019 – 2020 –
2021)**

Uraian	TAHUN					
	2019			2020		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERHUBUNGAN						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.894.520.000,-	2.739.363.967,-	94,64	6.481.042.328,-	6.006.416.282,-	92.6
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	2.894.520.000,-	2.739.363.967,-	94,64	6.481.042.328,-	6.006.416.282,-	92.6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.541.470.000,-	2.317.632.154,-	91,19	2.609.490.000,-	2.583.262.500,-	98.9
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.174.030.000,-	1.124.081.500,-	95,75	1.651.640.000,-	1.626.455.600,-	99.9
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.367.440.000,-	1.193.550.654,-	87,28	957.850.000,-	956.806.900,-	99.9
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.576.400.000,-	3.497.222.813,-	97,79	1.894.725.000,-	1.835.361.366,-	96.8
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.529.400.000,-	2.504.409.269,-	99,01	1.620.875.000,-	1.585.592.953,-	97.8
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.047.000.000,-	992.813.544,-	94,82	273.850.000,-	249.768.413,-	91.5

Uraian	TAHUN					
	2019			2020		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	710.832.000,-	705.082.650,-	99,19	1.396.785.000,-	1.390.503.686,-	99,5
Penyusun Dokumen Perencanaan dan Anggaran	560.832.000,-	555.082.650,-	98,97	1.196.035.000,-	1.190.211.550,-	99,5
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	150.000.000,-	150.000.000,-	100,00	200.750.000,-	200.292.136,-	99,7
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	5.198.724.000,-	4.032.994.438,-	77,58	6.896.662.050,-	5.958.194.000,-	86,3
Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	3.492.164.000,-	2.453.224.974,-	70,25	5.607.013.050,-	5.575.482.700,-	99,5
Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	642.960.000,-	590.354.763,-	91,82	271.800.000,-	223.901.200,-	82,3
Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	1.063.600.000,-	989.414.701,-	93,03	272.475.000,-	158.810.100,-	58,2
Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	3.037.846.500,-	2.498.922.280,-	82,26	685.205.000,-	617.900.036,-	90,1

Uraian	TAHUN					
	2019			2020		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	2.314.146.500,-	1.824.237.497,-	78,83	149.780.000,-	143.567.436,-	96,5
Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	551.800.000,-	521.328.983,-	94,48	141.265.000,-	103.952.775,-	73,5
Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	171.900.000,-	153.355.800,-	89,21	394.160.000,-	370.379.825,-	93,9
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	21.109.330.000,-	4.829.829.048,15	22,88	1.257.771.600,-	1.228.638.629,-	97,6
Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekretaapian	156.010.000,-	127.701.595,-	81,85	202.535.000,-	201.304.326,-	91,2
Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	548.160.000,-	526.859.649,-	96,11	943.876.600,-	940.080.225,-	99,6
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasu Moda	20.405.160.000,-	4.175.267.804,15	20,46	93.360.000,-	87.254.078,-	93,4

Uraian	TAHUN					
	2019			2020		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
UPTD TERMINAL						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.075.964.000,-	937.108.401,-	87,09	5.607.013.050,-	5.575.482.700,-	99,5
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.075.964.000,-	937.108.401,-	87,09	271.800.000,-	223.901.200,-	82,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	413.200.000,-	405.759.350,-	98,20	272.475.000,-	158.810.100,-	58,2
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	19.000.000,-	14.845.750,-	78,14	685.205.000,-	617.900.036,-	90,1
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	394.200.000,-	390.913.600,-	99,17	427.636.500,-	408.215.400,-	95,4
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	138.200.000,-	134.853.600,-	97,58	95.000.000,-	94.175.000,-	99,1
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	138.200.000,-	134.853.600,-	97,58	200.750.000,-	200.292.136,-	99,7
Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	3.217.350.000,-	1.016.718.500,-	31,60	6.896.662.050,-	5.958.194.000,-	86,3
Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I	2.744.800.000,-	581.443.600,-	21,18	5.607.013.050,-	5.575.482.700,-	99,5
Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II	472.550.000,-	435.274.900,-	92,11	271.800.000,-	223.901.200,-	82,3
JUMLAH	43.913.836.500,-	23,115,487,201.15	52,64	23.581.580.643,-	21.859.800.204	92,6

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TA. 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	62,692,443,000	51,835,230,868	82.68
2.15.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	58,652,443,000.00	48,218,499,592	82.21
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30,504,412,600.00	27,164,069,670	89.05
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,169,533,800.00	1,124,248,189	96.13
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401,200,000.00	378,186,092	94.26
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	374,333,800.00	365,235,772	97.57
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	234,300,000.00	227,836,625	97.24
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159,700,000.00	152,989,700	95.80
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,160,759,824.00	14,738,638,120	85.89
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,160,759,824.00	14,738,638,120	85.89
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	753,000,000.00	539,289,413	71.62
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	343,750,000.00	333,332,550	96.97
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	409,250,000.00	205,956,863	50.33
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,571,020,000.00	1,520,654,271	96.79
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,000,000.00	23,960,500	99.84
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,600,000.00	69,514,250	99.88
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	177,420,000.00	177,395,325	99.99
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,300,000,000.00	1,249,784,196	96.14
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391,958,500.00	373,429,000	95.27
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131,558,500.00	116,480,000	88.54
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260,400,000.00	256,949,000	98.67
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,696,265,976.00	5,386,643,585	94.56
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,280,000.00	8,935,550	35.35
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,164,770,200.00	2,926,218,534	92.46
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,506,215,776.00	2,451,489,501	97.82
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,761,874,500.00	3,481,167,092	92.54
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	74,545,000.00	73,855,000	99.07
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,046,500.00	103,721,000	89.38
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	385,424,000.00	384,687,000	99.81
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,185,859,000.00	2,918,904,092	91.62
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15,524,035,275.00	13,607,106,951	87.65
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12,472,569,175.00	11,152,432,285	89.42
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12,272,569,175.00	10,991,568,385	89.56
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	200,000,000.00	160,863,900	80.43
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1,000,000,000.00	900,410,830	90.04
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1,000,000,000.00	900,410,830	90.04
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	846,000,000.00	617,326,460	72.97
2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25,000,000.00	20,990,000	83.96
2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50,750,000.00	50,136,800	98.79
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	202,000,000.00	95,394,600	47.23
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	568,250,000.00	450,805,060	79.33
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	455,999,900.00	407,096,488	89.28
2.15.02.1.09.02	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	455,999,900.00	407,096,488	89.28
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	533,313,700.00	344,356,900	64.57
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	71,958,700.00	70,400,000	97.83
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	461,355,000.00	273,956,900	59.38
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	216,152,500.00	185,483,988	85.81
2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25,000,000.00	18,240,000	72.96
2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi	191,152,500.00	167,243,988	87.49

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12,124,942,825	7,319,264,313	60.37
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	750,000,000	669,150,250	89.22
2.15.03.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	393,650,000	371,359,750	94.34
2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	356,350,000	297,790,500	83.57
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	332,000,000	300,694,000	90.57
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem	64,900,000	64,156,400	98.85
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	267,100,000	236,537,600	88.56
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10,314,317,825	5,719,990,433	55.46
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6,333,079,825	2,561,643,818	40.45
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	3,981,238,000	3,158,346,615	79.33
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728,625,000	629,429,630	86.39
2.15.03.1.10.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728,625,000	629,429,630	86.39
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	499,052,300	128,058,658	25.66
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	499,052,300	128,058,658	25.66
2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi	409,634,300	45,576,555	11.13
2.15.05.1.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi	89,418,000	82,482,103	92.24
2.15.01.02	UPTD TERMINAL	4,040,000,000	3,616,731,276	89.52
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,256,359,734	2,119,307,282	93.93
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254,355,000	233,843,660	91.94
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,800,000	5,610,500	71.93
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,000,000	16,323,750	90.69
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,555,000	43,013,750	98.76
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185,000,000	168,895,660	91.29
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151,840,000	145,179,900	95.61
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,000,000	95,366,000	96.33
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,840,000	49,813,900	94.27
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,820,164,734	1,716,163,472	94.29
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,950,000	1,350,000	69.23
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121,800,000	75,160,854	61.71
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,696,414,734	1,639,652,618	96.65
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30,000,000	24,120,250	80.40
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	24,120,250	80.40
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,783,640,266	1,497,423,994	83.95
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1,783,640,266	1,497,423,994	83.95
2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	574,765,266	525,113,200	91.36
2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1,208,875,000	972,310,794	80.43

Catatan :

Pada periode 2013 – 2018 terdapat perubahan Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Semula (kurun waktu 2013 – 2016) :

- a. Jumlah Program : 15 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 27 Kegiatan

2. Menjadi (kurun waktu 2017 – 2018) :

- a. Jumlah Program : 9 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan

Rasio realisasi anggaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim selama periode 2013 – 2018 rata – rata adalah 93 % dengan rasio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 96,42% dan rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 89,19%. Pertumbuhan anggaran selama periode 2013 – 2018 dan realisasi menurun sebesar $\pm 30\%$. Rata – rata rasio realisasi anggaran sebesar 93% adalah rasio yang cukup baik dicapai oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dimana pendanaan pada program prioritas yang merupakan pembangunan fisik menjadi faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran, permasalahan pembangunan fisik di lapangan sangat mempengaruhi daya serap anggaran sehingga diperlukan manajemen proyek yang baik untuk dapat meningkatkan daya serap anggaran.

Rasio realisasi anggaran pada program – program bersifat manajerial berkisar di angka $\pm 88\%$ atau masih di bawah 90%, sehingga masih perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkannya, KPA dan PPTK mempunyai peran penting untuk dapat merencanakan dan merealisasikan dengan baik kegiatannyasesuai target realisasi yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan agar dapat ditindaklanjuti sehingga dapat mempercepat daya serap anggaran pada pelaksanaan Renstra selanjutnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang berada diantara perairan ALKI II;
2. Keberagaman Sumber Daya Alam Kalimantan Timur yang beraneka ragam, yang memungkinkan lahirnya inovasi-inovasi di Bidang Perhubungan;
3. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang proporsional karena masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemampuan yang sangat signifikan untuk dikembangkan;
4. Penyebaran penduduk di Kalimantan Timur yang tidak merata, sehingga sangat memerlukan kesinambungan dan integrasi sektor transportasi kewilayahan;
5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur;
6. Kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur;
7. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur;
8. Kemajemukan tersedianya sarana dan prasarana di Kalimantan Timur;
9. Lemahnya pelaksanaan regulasi Bidang Perhubungan di Daerah;
10. Minimnya Regulasi/Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Bidang Perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara;

11. Kurang optimalnya tingkat konsistensi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
12. Reharmonisasi Regulasi antara Pusat dan Daerah;
13. Pengembangan Pelabuhan Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) menjadi peluang Pendapatan;
14. Menjadikan Kaltim Berdaulat di Bidang Perhubungan;
15. Sinkronisasi Konektivitas ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Keinginan dan cita cita Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk mengintegrasikan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah;
2. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur yang dominan konsumtif, sehingga memacu pelayanan transportasi yang harus merata dan mencukupi;
3. Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan yang berkeinginan untuk menambah kemampuan kompetensi keteknisan;
4. Sumber Daya Alam yang melimpah sangat memungkinkan untuk mendapat alokasi anggaran pembangunan Bidang Perhubungan secara proporsional
5. Peningkatan kebutuhan informasi dan teknologi, memacu untuk senantiasa berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan;
6. Kondisi semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Timur;

7. Tingkat kepedulian masyarakat Kalimantan Timur yang tinggi, akan pentingnya pemenuhan fasilitas perhubungan baik moda darat, laut dan udara
8. Peningkatan pelayanan transportasi darat yang bersifat missal dan ramah lingkungan untuk angkutan barang dan orang;
9. Komitmen para pengambil keputusan terkait dengan SDGs dan Pengarustamaan Gender (PUG);
10. Adanya upaya harmonisasi regulasi oleh para pengambil kebijakan;
11. Adanya upaya penyelarasan program-program prioritas yang mendukung percepatan pembangunan Kawasan Khusus baik Kawasan Industri, Pusat Industri, Pusat Pemukiman dan Daerah Perbatasan, Pedalaman dan tertinggal;
12. Dukungan Project Prioritas Pembangunan Transportasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kab. Penajam Paser Utara dari Pemerintah Pusat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU TRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, dan lampu penerangan jalan
- b. Masih adanya kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan;
- c. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
- f. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
- h. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
- i. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

2. Bidang Pelayaran

- a. Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar untuk kapal – kapal angkutan SDP;
- b. Masih terdapat ketidak samaan persepsi terkait regulasi penanganan kapal – kapal SDP;
- c. Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal – kapal yang berlayar di laut dan SDP;
- d. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan;

- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS SDP;
- f. Kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan SDP;
- g. Masih adanya fasilitas dermaga sungai dan penyeberangan yang kurang layak dan tidak memadai sehingga perlu peningkatan/perbaikan sesuai dengan perkembangan transportasi saat ini;
- h. Belum optimalnya pelaksanaan SOP penanganan kapal –kapal Angkutan SDP di Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Masih adanya pelabuhan yang belum diserahkan pengelolaannya sesuai kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Rendahnya kesadaran Badan Usaha Kepelabuhanan, angkutan dan jasa terkait angkutan diperaikan untuk melaporkan setiap kegiatan usahanya;
- k. Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan Bidang Pelayaran di Kalimantan Timur.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
- b. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
- c. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga SDP;
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/Dermaga SDP di Kaltim;
- f. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se-Kaltim;
- g. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
- h. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. UPTD Terminal Type B

- a. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
- f. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Tipe B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
- g. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Type B di Kalimantan Timur;
- h. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
- i. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
- j. Belum adanya regulasi tentang legalitas aset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
- k. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

3.1.1. Identifikasi Potensi Kewilayahan

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai beberapa potensi untuk dikembangkan antara lain :

1. Wilayah Bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Timur dapat dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan, kehutanan dan pertanian bagi komoditi ekspor karena memiliki pangsa pasar yang luas dan nilai ekonomis tinggi. Komoditas tersebut meliputi hasil perkebunan tanaman keras, hasil hutan tanaman industri.
2. Wilayah Bagian Selatan dan Utara selain Kelapa Sawit dan Batu Bara, juga berpotensi dikembangkan wisata laut serta kawasan perikanan.

3. Sebagai kelengkapan dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah bagian Utara Prov. Kaltim ini, perlu dikembangkan beberapa prasarana perhubungan sebagai berikut :
 - a. Pelabuhan Laut Internasional Maloy Teluk Golok yang berlokasi di Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur yang berfungsi sebagai outlet/inlet bagi komoditas Batu Bara (Miang Besar) ; komoditas CPO / kelapa sawit dan turunannya (Teluk Golok) ; Ekspor Import untuk Cargo (Teluk Golok) ; Penumpang (Maloy eksisting) ; komoditi perikanan (di Bual-Bual).
 - b. Pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan terutama palm oil industry, yang dapat menampung hasil; perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yaitu pembangunan pelabuhan di Karingau (TPK) dan Pelabuhan Buluminung Kab. Penajam Paser Utara.
 - c. Industri semen Kalimantan Timur, untuk memasok kebutuhan semen di Provinsi Kalimantan Timur serta Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara akan dibangun Pelabuhan Laut di Teluk Sulaiman Kab. Berau.
 - d. Pengembangan jaringan jalan baru yang dapat lebih luas mengakses ke sentra-sentra produksi hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah timur dengan pusat industri pengolahannya yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Buluminung, yang dimaksudkan juga untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi wilayah kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
 - e. Pengembangan Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau lebih difokuskan pada kegiatan arus barang dan penumpang dari Pulau Jawa atau daerah lain serta untuk menampung arus kegiatan dari wilayah belakang Provinsi Kalimantan Utara.
 - f. Pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi

pembukaan jalur penerbangan nusantara lainnya atau ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Selain itu juga dilakukan pengembangan jalur penerbangan reguler intra kalimantan bagi 3 (tiga) Bandar Udara lainnya yaitu : Bandara Maratua di Kab. Berau (Destinasi Wisata Pulau Derawan dan sekitarnya) ; Bandara Melalan di Kab. Kutai Barat dan rencana pembangunan Bandara Long Bagun di Kab. Mahakam Hulu.

- g. Pengembangan intermoda transportasi regional kalimantan antara moda angkutan sungai, laut, kereta api, jalan raya dan udara. Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana transportasi adalah pengembangan sistem jaringan prasarana atau simpul strategis yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai struktur tata ruang yang meliputi sistem jaringan transportasi jalan, sungai, Penyebarangan, laut, dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul pengembangan transportasi yang direncanakan dapat menunjang pengembangan wilayah secara keseluruhan.

3.2.3. Identifikasi Tujuan Berdasarkan Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Pengembangan angkutan massal pada lintas Samarinda-Balikpapan ; Samarinda - Bontang - Sangatta - Berau (Kawasan SAMBOSABE)
- b. Meningkatkan kapasitas seat penumpang (dari MPU ke bus sedang/besar);
- c. Mengembangkan trayek angkutan bus Bandara APT. Pranoto Samarinda ke pusat-pusat bangkitan penumpang dan atau pusat-pusat industri;
- d. Mengembangkan pelayanan daerah terisolasi dengan angkutan perintis;
- e. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Provinsi;
- f. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, pagar pengaman dan lain-lain) pada ruas jalan Provinsi;

- g. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
- h. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi teknis dan tenaga PPNS Jalan;
- i. Tersedia Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Menurunnya angka kecelakaan baik kategori ringan, sedang dan atau berat;
- k. Tersedianya dokumen rencana induk/master plan LLAJ Prov. Kaltim;
- l. Menurunnya tingkat pelanggaran (ODOL) angkutan barang di jalan;
- m. Terpenuhi pelayanan angkutan umum AKDP guna mendukung mobilitas masyarakat di Kalimantan Timur
- n. Terpenuhi SPM angkutan umum AKDP di Kaltim;
- o. Terwujudnya sistem manajemen keselamatan (SMK) operator angkutan umum AKPD di Kaltim;
- p. Menurunnya tingkat kecelakaan angkutan di Jalan Provinsi;
- q. Terbangunnya terminal Type B di masing-masing Kab/Kota di Kalimantan Timur;
- r. Tercapainya target Capaian Kinerja Kepuasan Masyarakat pengguna Terminal type B di Kalimantan Timur.
- s. Mendukung IKN

2. Bidang Pelayaran

- a. Peningkatan pelayanan trayek angkutan penumpang dan barang pada daerah yang masih terisolasi dan pelayanan trayek angkutan barang;
- b. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Kaltim;
- d. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;

- e. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- f. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- g. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi.
- h. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan;
- i. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan;
- j. Terpenuhinya standar keselamatan kapal yang berlayar diperairan daratan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- k. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT;
- l. Terbangunnya dermaga sungai Aji Imbut Kab. Kutai Kertanegara;
- m. Terbangunnya dermaga sungai Muara Kaman Kab. Kutai Kertanegara;
- n. Terbangunnya dermaga sungai Tabang Kab. Kutai Kertanegara;
- o. Peningkatan Pelabuhan Sungai Melak Kab. Kutai Barat;
- p. Peningkatan Pelabuhan Sungai Tering Kab. Kutai Barat;
- q. Peningkatan Pelabuhan Sungai Ujok Bilang Kab. Mahulu;
- r. Peningkatan Pelabuhan Sungai Long Pahangai Kab. Mahakam Hulu;
- s. Peningkatan Pelabuhan Sungai Senaken Tana Paser;
- t. Peningkatan Pelabuhan Sungai Meridan di PPU;

- u. Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Kab. Kutai Timur;
- v. Terlaksananya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan oleh Pemerintah Daerah.
- w. Mendukung IKN

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Terbangunnya jaringan trase Kereta Api Umum dan Barang di Kalimantan Timur
- b. Terbangun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- c. Tersedianya System Informasi Manajemen Keterpaduan Moda/antar moda di Kalimantan Timur
- d. Terintegrasinya layanan terminal type di Kalimantan Timur secara on line
- e. Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional
- f. Beroperasinya secara optimal pelabuhan pengumpan regional di Kalimantan Timur
- g. Tersedianya dokumen lingkungan di Pelabuhan Pengumpan Regional dan Terminal Type B se- Kalimantan Timur
- h. Mendukung IKN

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sesuai dengan janji-janji politik Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Timur Terpilih periode 2018-2023 maka visi dan misi dalam RPJMD 2019-2023 adalah :

3.2.1. Visi

“Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”

3.2.2. Misi :

1. Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

- 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

3.2.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Tabel. 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Berdasarkan Program Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih 2019-2023)

Misi ke-3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.

No	Program Prioritas Renstra SKPD	Implementasi Rencana Kegiatan		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
1	2	3		4		5	
1.	Program Pengelolaan Pelayaran (Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP)	1.	Pembinaan, pembangunan dan peningkatan pelabuhan	1.	Belum optimalnya layanan jasa kepelabuhanan TPK Balikpapan	1.	Terus ditingkatkannya upaya optimalisasi jasa kepelabuhanan di pelabuhan TPK Balikpapan, Maloy Kutim dan pelabuhan Pengumpan Regional

		2.	Pembinaan penyelenggaraan SDP dan pelabuhan rakyat	2.	Belum optimalnya layanan jasa kepelabuhanan Pelabuhan Maloy Kutai Timur	2.	Terus ditingkatkan fasilitas kepelabuhanan yang ada
		3.	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	3.	Belum optimalnya layanan jasa kepelabuhanan pelabuhan pengumpan regional	3.	Terus ditingkatkan sosialisasi keselamatan dan audit sarana diperairan
				4.	Belum layaknya fasilitas pelabuhan		
				5.	Masih tingginya angka kecelakaan di perairan		
				6.	Belum sadarnya masyarakat untuk menggunakan safety (Life Jacket) saat berlayar		
				7.	Belum		

					optimalnya Audit Kelayakan Sarana Perairan		
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas)	1.	Pengadaan fasilitas pengaman lalu lintas	1.	Belum adanya studi kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan di Jln Provinsi Kaltim	1.	Akan disusun dokumen kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan
		2.	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	2.	Masih terbatasnya jumlah rambu, marka, RPPJ, dan pagar pengaman	2.	Terus ditingkatkan jumlah rambu, marka, pagar, RPPJ
		3.	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	3.	Masih tingginya pelanggaran di jalan	3.	Terus diupayakan untuk menurunkan angka pelanggaran
				4.	Masih tingginya kecelakaan	4.	Terus diupayakan menurunkan

					di jalan raya		nya angka kecelakaan di jalan
				5.	Belum sinerginya pengurusan angkutan jalan (OSS)	5.	Terus disinergikan pengurusan angkutan jalan OSS
				6.	Belum optimalnya keikutsertaan Kab/Kota dalam kegiatan Pelajar Pelopor, AKUT dan WTN	6.	Terus diupayakan keikutsertaan kab/kota pada kegiatan Pelajar Pelopor, AKUT dan WTN
				7.	Belum optimalnya regulasi ASK	7.	Terus di optimalnya regulasi ASK
				8.	Belum optimalnya pelaksanaan audit sarana angkutan jalan	8.	Terus ditambah dengan Diklat tenaga Teknis yang ada
				9.	Rendahnya kuantitas tenaga teknis yang ada	9.	Terus dipotimalkan revisi regulasi ASK
				10.	Belum optimalnya pelaksanaan		

					n regulasi tentang ASK		
			Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	11.	Belum ada dokumen lingkungan di terminal type B	11.	Akan disusun dokumen lingkungan hidup kawasan terminal type B
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	12.	Belum adanya studi Pemadu Moda di Kaltim	12.	Akan disusun dokumen Rencana Induk Fasilitas Perhubungan baik darat, laut dan udara sesuai dengan kewenangan
		1.	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	1.	Belum tuntasnya masalah Aset Terminal Type B (P3D)	1.	Percepatan penyelesaian asset terminal Type B
		2.	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II	2.	Belum adanya dokumen Rencana Induk Terminal Type B	2.	Akan disusunnya Dokumen Rencana Induk Terminal Type B

				3.	Belum jelasnya status lahan terminal	3.	Percepatan penyelesaian serah terima lahan dari Kab/Kota ke Provinsi
				4.	Belum terintegrasi nya antar Terminal Type B	4.	Akan diintegrasikannya terminal Type B di Kaltim
				5.	Belum layak nya fasilitas terminal Type B	5.	Terus ditingkatkan fasilitas terminal Type B yang ada
3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian (Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan)	1.	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	1.	Belum ada rencana induk jaringan kereta api kab/kota	1.	Terus diupayakan penyusunan dokumen rencana induk perkeretaapian Kab/Kota

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan SDM yang beraklaq mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, serta

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

No	Program Prioritas Renstra SKPD	Implementasi Rencana Kegiatan		Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3		4	5
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; Program pelayanan administrasi perkantoran; Program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah)	1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Masih rendahnya daya saing SDM 2. Paradigma pelaksanaan Diklat	1. Terbatasnya rekrutmen ASN yg sesuai kompetensi 2. Terus ditingkatkan pemahaman pentingnya Diklat
		2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda	3. Persepsi tentang ketidak pastian pelaksanaan tugas dilingkungan Pemda	3. Optimalisasi kinerja ASN 4. Optimalisasi beban kerja sesuai ketentuan
		3	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	4. Lemahnya pembinaan beban kerja 5. Belum optimalnya upaya Re harmonisasi regulasi	5. Re Strukturisasi Kelembagaan dan Terus di pacu upaya me re harmonisasi regulasi
		4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Minimnya tenaga PPNS LLAJ dan SDP 7. Tingginya angka penyalahguna an Narkoba 8. Belum optimalnya	6. Pengiriman ASN ke Pusdik Reserse Mega Mendung 7. Terus ditingkatkan

				<p>pengelolaan asset</p> <p>9. Masih rendahnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah</p> <p>10. Belum optimalnya system administrasi kepegawaian</p> <p>11. Masih adanya disharmonisasi peraturan / kebijakan antara pusat, provinsi, kab/kota</p> <p>12. Kualitas pelayanan public masih belum memenuhi standart pelayanan minimal</p> <p>13. Belum optimalnya system online Submission (OSS)</p>	<p>sosialisasi penyalahgunaan Narkoba</p> <p>8. Terus ditingkatkan optimalisasi pengelolaan asset</p> <p>9. Akan ditingkatkan profesionalisme ASN</p> <p>10. Akan dioptimalkan system administrasi kepegawaian</p> <p>11. Akan dilakukan keselarasan dan reharmoniasi regulasi pusat, provinsi, kab/kota</p> <p>12. Akan ditingkatkan kualitas pelayanan public</p> <p>13. Akan dioptimalkan penyelenggaraan online single submission</p>
--	--	--	--	---	---

					(OSS)
--	--	--	--	--	-------

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	2	3	4	5
1	Kondisi pelabuhan/dermaga dan angkutan pelayaran yang tidak layak atau representatif lagi dengan perkembangan transportasi saat ini untuk meningkatkan ekonomi daerah	Kurangnya fasilitas pelabuhan/dermaga dan angkutan pelayaran	Minimnya kapasitas dan kualitas fasilitas pelabuhan/dermaga	Belum optimalnya kualitas pelayanan pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan
		Banyaknya angkutan pelayaran yang tidak laik layar	Kurangnya fasilitas dan penerapan peraturan keselamatan angkutan pelayaran	
		Banyaknya badan Usaha pelayaran yang tidak taat peraturan	Rendahnya kesadaran badan usaha kepelabuhanan, angkutan perairan dan jasa terkait perizinan dan pelaporan kegiatan usahanya	
2	Angka kecelakaan/pelanggaran lalu lintas yang tinggi	Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain	Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi darat
		Banyaknya angkutan barang/penumpang yang melanggar peraturan lalu lintas	Kurangnya sosialisasi dan penegakan regulasi LLAJ atau pengawasan dan pengendalian angkutan jalan.	
		Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam memahami keselamatan berlalu lintas di jalan	Kurangnya sosialisasi keselamatan beralu - lintas di jalan	
3	Minimnya pelayanan antarmoda	Minimnya perencanaan simpul transportasi, masterplan dan lingkungan prasarana perhubungan	Belum tersedianya perencanaan antarmoda yang terintegrasi	Belum optimalnya pelayanan antar moda
			Belum tersedianya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se-Kaltim	
			Belum tersedianya Rencana Induk dan kajian lingkungan Terminal dan pelabuhan/dermaga SDP	
4	Berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal	Kurangnya kualitas pelayanan di terminal	Minimnya sarana dan prasarana terminal	Belum Optimalnya pelayanan terminal
5	Kurangnya kinerja pelayanan ASN Perhubungan	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perhubungan	Kurangnya jumlah ASN yang bersertifikasi teknis	Belum optimalnya kinerja pelayanan ASN perhubungan dan harmonisasi peraturan/kebijakan/standard.
			Kurang optimalnya harmonisasi peraturan/kebijakan antara pusat, provinsi dan kab/kota	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan	Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/ dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
				Meningkatkan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP		Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayanan Rakyat
				Meningkatkan kualitas/jumlah badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran yang dibina		Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran
2		Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat	Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat	Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan
				Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan		Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan
				Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan		Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan
3		Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi dan dokumen lingkungan perhubungan	Mewujudkan lintasan/trase kereta api	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	
					Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
					Mengembangkan jumlah perencanaan dan pembangunan fasilitas pepadu moda	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pepadu Moda
4		Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B	Membangun/ Mengembangkan terminal type B Wilayah I (Samarinda, Bontang, Sangatta dan Berau)	Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	
					Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah II (Tenggarong,PPU, Tanah Grogot, Kutai Barat dan Mahulu)	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II
5		Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	
				Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
			Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi peraturan /kebijakan pusat, provinsi dan kab/kota			Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
				Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik			Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah
				Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			

3.3. HASIL TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapatdiuraikan arah kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Rencana Strategis 2020-2024
Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi simpul transportasi eksisting• Pembangunan simpul tranportasi baru• Pembagian komoditi barang ekspor impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia• Reaktivasi jalur moda transportasi• Sinergritas angkutan umum dengan moda tranportasi lokal• Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia• Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan,	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Jaringan Transportasi Eksisting• Perluasan jaringan layanan transportasi• Penguatan transportasi antar moda dan multi moda• Pembangunan fasilitas alih moda dan multi moda• Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi• Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesi• Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi• Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan PSN• Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local• Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan

		<p>terluar, dan terpencil</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil• Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local• Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi	<p>simpul transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia• Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia• Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan• Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda• Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial?
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi• Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana• Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi• Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi• Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk

		<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi• Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan• Penguatan skema pendanaan pengembangan system transportasi perkotaan• Mendukung kinerja logistic nasional	<p>memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan• Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP• Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan gender, difabel, dan lansia• Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana• Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi• Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (Buy The Service)• Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat)• Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestic• Pengembangan sistem informasi logistic (e-
--	--	---	---

			<p>logistic)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland • Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri • Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR <i>online</i>, <i>travel data recording</i> • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi • Control kelengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan • Pembatasan usia saran prasarana transportasi • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan • Edukasi keselamatan transportasi • Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi • Peningkatan sertifikasi

		<p>keselamatan dan keamanan moda angkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian • Pengembangan system informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi • Pemenuhan SDM keselamatan dan keamanan transportasi darat, KA, Laut, Udara 	<p>sarana dan prasarana kereta api</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Jangka waktu proses

		<p>dinamika kondisi transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan 	<p>pengusulan kebijakan hingga menjadi keputusan atau peraturan menteri perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam keputusan atau peraturan menteri perhubungan • Peningkatan EST (Environmentally Sustainable Transportation) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar • Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industry dan pengembangan sarana prasarana transportasi • Pembentukan SDM yang berkarakter dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni • Peningkatan <i>Link and Match</i> SDM Transportasi • Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan • Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti • Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai –

		berintegrasi <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan relevansi dan daya saing lembaga diklat SDM transportasi • Optimalisasi peram kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi 	nilai agama <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara • Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi disektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi • Peningkatan kualitas dan pengembangan penelitian (<i>Research & Development</i>) • Transformasi kelembagaan Balai/UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN • Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung Nilai Indeks berkelanjutan (<i>sustainability index</i>) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan <i>feedback</i> bagi peningkatan kualitas sistem transportasi • Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau miigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor transportasi Melakukan Pemetaan

		peningkatab kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.	Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reuiu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu • Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi • Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Dinas Perhubungan • Pengembangan sistem e-monev untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan • Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di Dinas Perhubungan • Pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Dinas Perhubungan • Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi • Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik

		<p>dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyempurnan SOP layanan transportasi• Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Dinas Perhubungan• Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT• Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronis regulasi antar lembaga• Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaran SPIP Kementerian	<p>komersil maupun non komersil</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi• Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung <i>smart city</i> pada kota besar dan metropolitan Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dinas Perhubungan
--	--	---	---

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan.

Tabel. 3.4.

Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan
Peserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Perlu dilakukan pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi dan memaksimalkan layanan angkutan massal diperkotaan
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan	Terus meningkatkan penanganan gangguan keselamatan

		transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	transportasi dengan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan dengan melakukan penelitian di bidang perhubungan yang berkualitas
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana

		transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta adanya pengoptimalan penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Perlunya meningkatkan pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerja dinas perhubungan	Kurang maksimalnya pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerjadinas perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	Perlunya mewujudkan <i>good governance</i> dalam bidang pelayanan perhubungan dan kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan dan kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam

				bidang transportasi
--	--	--	--	---------------------

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahulu	Belum terbangunnya a terminal Tipe B di Kab. Mahakam Hulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Hulu	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.	Pembangunan terminal penumpang Tipe Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya a terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B diKab. Kutai Barat	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3.	Pembangunan terminal penumpang	Belum terbangunnya a terminal	Belum terbangunnya terminal	Terus dikembangkan peningkatan simpul

	Terpadu di Ibukota Provinsi	penumpang terpadu di Ibukota Provinsi Kaltim	penumpang Terpadu di Kota Samarinda	transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4.	Pengembangan dan peningkatan Terminal Type B sei kunjang, lempake, sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B sei kunjang, lempake, sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B sei kunjang, lempake, sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar dan atau dalam provinsi	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Prov. Kaltim	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provi.Kaltim	Terus ditingkatkannya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota antar dan atau dalam Provinsi	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya jaringan angkutan penyeberangan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat
7.	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Kaltim	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi	Terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan

		Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Timur
8.	Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Terus ditingkatkannya prasarana pelabuhan di Maloy
9.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan
10.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang
11.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur
12.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di

	pengumpul Tanjung Redeb, Mantaritimip dan rencana Teluk Sulaiman di Kab. Berau	anpelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritimip dan Teluk Sulaiman di Kab. Berau	n pelabuhanTanjung Redeb, Mantaritimip dan Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Kabupaten Berau
13.	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan anpelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan an pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam Prov. Kaltim	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai dan Danau pada Alur Pelayaran Sungai Mahakam
14.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu
15.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahakam Hulu	Belum Optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahulu
16.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab.	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu

	Mahakam Hulu	anBandara Datah Dawai Kab. Mahulu	n Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu	
17.	Pembangunan Terminal Type A Samarinda Seberang	Belum optimalnya fasilitas prasarana terminal Type A Kota Samarinda	Belum optimalnya fasilitas prasarana terminal Type A Kota Samarinda	Terus dikembangkan fasilitas prasarana terminal Type A Kota Samarinda
18.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian berupa pembangunan jalan kereta api dan rencana pembangunan stasiun kereta api	Belum terbangunnya a sistem jaringan perkeretaapia n di Kalimantan Timur	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapia n di Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya pembangunan sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur
19.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kawasan Perkotaan Kota Balikpapan	Belum tersediannya Saranadan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Belum tersediannya Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkannya pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan
20.	Pengembangan sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder)	Belum tersediannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota	Terus dikembangkannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan

		Balikpapan	Balikpapan	
--	--	------------	------------	--

3.4.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merujuk pada Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim dan Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan kedalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023 terhadap rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup mendasari adanya keinginan dan semangat untuk melakukan perubahan dalam penyusunan cita-cita lima tahun kedepan dalam RENSTRA 2019-2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dengan adanya percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *good governance*.
2. Mendasari terjadinya dinamika perekonomian Regional, domestik maupun global yang mengharuskan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa diharuskan siap menghadapi perubahan serta memperhatikan keberadaan Kalimantan Timur yang berada di wilayah AKLI II yang sangat berpeotensi untuk menjadi beranda depan dalam pembangunan Indonesia Wilayah Tengah. Dimana hal ini mengharuskan Kalimantan Timur mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya Provinsi yang maju, untuk itu dipandang perlu untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, oleh karena itu melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 telah diterbitkan MP3EI Tahun 2011-2025, yang akan memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, khususnya Regional Kalimantan Timur.
3. Adanya beberapa kejadian bencana alam (banjir, jalan putus dan longsor) yang masih melanda wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan isu strategis yang perlu dimunculkan mengingat berbagai bencana tersebut cukup berpengaruh

terhadap kinerja penyelenggaraan prasarana transportasi, terutama yang berada di kawasan rawan bencana.

4. Adanya kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional melalui Inpres No.9 Tahun 2000 mengamanahkan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk megintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing.

Dalam rangka mengintergrasikan rencana dan program sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan, dengan prediksi program yang terindikasi berpotensi berdampak pada Isu Strategis KLHS Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
2. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan
3. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara

Dari 3 (tiga) Program tersebut yang paling berpotensi terindikasi berdampak pada Isu Strategis KLHS adalah Program pembukaan dan peningktan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara.

1. Mitigasi dampak program terhadap aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan

Program	Dampak program terhadap aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Transportasi Darat : a. Mempengaruhi terjadinya konversi lahan produktif yang ada di sisi kanan kiri jalan b. Meningkatkan pencemaran lingkungan (sampah, udara) disekitar terminal yang berakibat pada meningkatnya vector penyakit	a. Kajian lingkungan untuk pembangunan terminal beserta fasilitas penunjang b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan
	Transportasi Laut, Sungai & Danau :	a. Kajian lingkungan untuk

	<p>a. Mengganggu ekosistem pantai, laut, sungai dan danau</p> <p>b. Meningkatkan abrasi disisi kanan kiri pelabuhan</p> <p>c. Meningkatkan pencemaran lingkungan</p> <p>d. Dapat memicu meningkatnya pemukiman yang tidak teratur disekitar, pelabuhan terminal yang berakibat pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>e. Mengurangi luas wilayah tangkapan nelayan tradisional</p>	<p>pembangunan pelabuhan, terminal khusus dan TUKS</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan</p> <p>c. Mempertimbangkan pengendalian ekosistem pantai, laut, sungai dan danau</p>
	<p>Transportasi Udara :</p> <p>a. Memicu alih fungsi lahan disekitar bandara</p> <p>b. Meningkatkan kebisingan</p> <p>c. Daerah resapan air berkurang sehingga run off meningkat</p> <p>d. Pembatasan kawasan terbangun di sekitar bandara</p>	<p>a. Kajian lingkungan untuk pembangunan bandara beserta fasilitas penunjangnya</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan</p> <p>c. Pembuatan zoning regulation untuk kawasan permukiman di sekitar bandara</p>

2. Mitigasi dampak program terhadap aspek pelayanan infrastruktur dan daya saing

Program	Dampak program terhadap aspek pelayanan infrastruktur dan daya saing	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Dapat memicu meningkatnya permukiman baru yang tidak teratur disekitar terminal, pelabuhan terminal khusus, dan Bandara	Pembuatan zoning regulation untuk kawasan permukiman disekitar terminal, pelabuhan dan terminal khusus dan Bandara

3. Mitigasi dampak program terhadap aspek social ekonomi dan kesehatan masyarakat

Program	Dampak program terhadap aspek social ekonomi dan kesehatan masyarakat	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Meningkatnya kerentanan sosial	a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat b. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Berdasarkan identifikasi perkiraan dampak negative yang ditimbulkan oleh program prioritas diatas, terkait dengan upaya meminimalisir dampak negative terhadap Isu KLHS Prov. Kalimantan Timur, upaya dan rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya mitigasi secara terencana dan terkendali, melalui pendekatan teknologi, social dan kelembagaan
2. Melakukan kajian lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, baik tata ruang pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan :
 - a. Peraturan dan mekanisme izin pinjam pakai, jika rencana kegiatan (Non kehutanan) berada pada kawasan budidaya kehutanana (KBK)
 - b. Tidak termasuk dalam area yang dilarang sesuai SK Menteri Kehutanan No. 608
3. Dalam skala proyek, pembangunan fisik dari program-program tersebut harus mempunyai kajian lingkungan
4. Terkait dengan pelayanan infrastruktur dan daya saing, maka harus memperhatikan :
 - a. Peraturan Daerah No : 10 Tahun 2012
 - b. Pengetatan perizinan pembangunan pelabuhan. Terminal, Bandara beserta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan
 - b. Pengkajian lokasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada

Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pelayaran (pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan).

- a. Pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan/dermaga
- b. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya penguatan sektor ekonomi daerah dan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi khususnya untuk aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara komprehensif dari sisi pemenuhan infrastruktur, keselamatan dan pembinaan badan usaha.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi.

3. Peningkatan pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Peningkatan kemudahan dan kenyamanan pelayanan antarmoda merupakan tuntutan dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang efektif dan efisien
- b. Peningkatan pelayanan antarmoda di Kalimantan Timur guna mewujudkan antarmoda yang terintegrasi dengan pemadu moda dimulai dengan perencananya yang matang sehingga dapat diperoleh informasi simpul – simpul transportasi yang terintegrasi dan memadai.

4. Peningkatan pelayanan terminal.

- a. Pengelolaan Terminal Tipe Boleh pemerintah provinsi merupakan amanat UU 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

- b. Pelayanan terminal menjaditolok ukur keberhasilan pemerintah dalam tugas dan fungsinya sehingga peningkatan pelayanan terminal wajib dilakukan dengan strategi peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B.

5. Peningkatan kinerja pelayanan ASN perhubungan dan harmonisasi peraturan/kebijakan/standard.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor perhubungan dan pembenahan peraturan/kebijakan/regulasi di sektor perhubungan adalah faktor penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sektor perhubungan
- b. Peningkatan kualifikasi teknis dan kompetensi SDM perhubungan
- c. Harmonisasi peraturan/kebijakan akan dapat mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi di Kalimantan Timur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan

Indikator : Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton)

4.1.2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas kepusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman.

Indikator : Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)

2. Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat

Indikator : Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan (%)

3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dinas perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 (TC.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah		Jumlah Penumpang (org) dan barang (ton) yang terlayani	10.392.536 (orang) 325.051.663 (ton)	10.705.000 (orang) 334.805.000 (ton)	11.026.150 (orang) 344.850.000 (ton)	11.356.200 (orang) 355.200.000 (ton)	11.700.000 (orang) 365.900.000 (ton)	12.050.000 (orang) 376.900.000 (ton)
	1. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	35%	40%	45%	50%

	dan Konektivitaske Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman							
	2. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat	Pertumbuh an kelaikan sarana prasarana LLJ (%)	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %

Menjadi :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1. Meningkatnya konektivitas		Jumlah	10.392.536 (orang)	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000 (orang)

dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan		Penumpang (org) dan barang (ton) yang terlayani	325.051.663 (ton)	(orang) 341.529.897 (ton)	(orang) 294.478.397 (ton)	(orang) 307.000.000 (ton)	(orang) 337.000.000 (ton)	370.000.000 (ton)
	1. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	32%	33%	34%	35%

	2. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat	Pertumbuh an kelaikan sarana prasarana LLJ (%)	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %
	3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyaraka t	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan :

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat;
3. Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi dan dokumen lingkungan perhubungan;
4. Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B;
5. Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah;
6. Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi peraturan /kebijakan pusat, provinsi dan kab/kota;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
8. Mendukung konektifitas transportasi ke IKN.

5.1.2. Kebijakan Perangkat Daerah :

1. Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan;
2. Meningkatkan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP;
3. Meningkatkan kualitas/jumlah badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran yang dibina;
4. Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan;
5. Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan;
6. Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan;
7. Mewujudkan lintasan/trase kereta api;
8. Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan;
9. Mengembangkan jumlah perencanaan dan pembangunan fasilitas pemadu moda;

10. Membangun / Mengembangkan terminal type B Wilayah I (Samarinda, Bontang, Sangatta dan Berau);
11. Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah II (Tenggarong, PPU, Tanah Grogot, Kutai Barat dan Mahulu);
12. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
13. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
14. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
15. Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah;
16. Mengembangkan perencanaan konektivitas transportasi ke IKN.

Keterkaitan antara Visi dan misi Gubernur /Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2023 dengan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini

Tabel 5.1. (TC.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
(Kesesuaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur terhadap Perangkat Daerah)

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat				
Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayah an	1 Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas kepusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman	1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan	1.	Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/ dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan
			2.	Meningkatan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP
			3.	Meningkatkan kualitas/jumlah badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran yang dibina

	2. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi darat	Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat	1.	Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan
			2.	Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan
			3.	Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan
		3. Menyediakan rencana pengembangan titik – titik simpul layanan transportasi dan dokumen lingkungan perhubungan	1.	Mewujudkan lintasan/trase kereta api
			2.	Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan
			3.	Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan
		4. Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B	1.	Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah I (Samarinda, Bontang, Sangatta dan Berau)
			2.	Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah II (Tenggarong, PPU, Tanah Grogot, Kutai Barat dan Mahulu)

	3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Peningkatan profesionalisme/ka	1.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
		5. pasitas dan integritas aparatur pemerintah	2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
		Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi	1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
		6. peraturan /kebijakan pusat, provinsi dan kab/kota		
		Peningkatan	1.	Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah
		7. kualitas pelayanan publik		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019– 2023, rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebanyak 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

1. Program Pembangunan Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP dengan 3 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pembinaan, pembangunan dan peningkatan pelabuhan
 - 2) Kegiatan pembinaan, penyelenggaraan SDP dan pelayaran rakyat
 - 3) Kegiatan pembinaan badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan 3 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas jalan
 - 2) Kegiatan pembinaan angkutan jalan
 - 3) Kegiatan pembinaan dan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan
3. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan 3 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pengembangan prasarana dan fasilitas perkeretaapian
 - 2) Kegiatan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
 - 3) Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemuatan moda
4. Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pembangunan dan peningkatan type B wilayah I
 - 2) Kegiatan pembangunan dan peningkatan terminal type B wilayah II
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 1 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
 - 2) Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
 - 2) Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
 - 2) Kegiatan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Sedangkan program prioritas pendukung program Gubernur / Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2023 adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Seiring dengan dinamika perubahan dampak dari Pandemi COVID-19 dan penyelarasan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya pada Kepmendagri 050 Tahun 2020 serta Kepmendagri 050 Tahun 2021 maka hasil dari pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebanyak 4 (empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan.

Dinas Perhubungan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B

2.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
- 3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

2.4 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

2.5 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
- 4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

2.6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

2.7 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

- 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- 2.8 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
- 2.9 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- 2.10 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- 2.11 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi

III. Program Pengelolaan Pelayaran

- 3.1 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - 1) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
- 3.2 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
- 3.3 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas
 - 1) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

- 3.4 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
- 3.5 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
 - 1) Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
- 3.6 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 3.7 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

- 4.1 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
- 4.2 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi

- 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi

UPTD Terminal :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B

2.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

- 1) Pembangunan Gedung Terminal
- 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Pada bagian ini ditampilkan secara rinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, seperti tabel berikut :

Tabel. 6.1 (TC.27)

**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**

TABEL 6.1 (T-C.27)																					
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR																					
Misi/Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan																					
Tujuan : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman			Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton)	10.392.536 (orang) & 325.051.663 (ton)	10.721.656 (orang) & 341.529.897 (ton)	39,140,200,519	3.570.750 (orang) & 294.478.397 (ton)	34,611,213,880	4.500.000 (orang) & 307.000.000 (ton)	62,692,443,000	6.000.000 (orang) & 337.000.000 (ton)	56,700,000,000	8.100.000 (orang) & 370.000.000 (ton)	75,000,000,000	8.100.000 (orang) & 370.000.000 (ton)	268,143,857,399	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				Presentase Pergerakan Sarana Transportasi (%)	25%	30%	2,626,623,875	32%	819,204,362	33%	12,623,995,125	34%	6,005,777,515	35%	6,434,810,354	35%	28,510,411,231	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83 %)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83 %)	2,498,922,280	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (84 %)	617,900,036	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85 %)	12,124,942,825	87%	5,005,777,515	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (88 %)	5,238,493,918	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (88 %)	25,486,036,574	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP (Izin)	180 Izin	180 Izin	521,328,983	190 Izin	103,952,775	200 Izin	750,000,000	250 Izin	789,850,000	300 Izin	789,850,000	300 Izin	2,954,981,758	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.03.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu (Izin)	180 Izin	180 Izin	412,828,983	190 Izin	64,055,575	200 Izin	393,650,000	250 Izin	25,450,000		250 Unit	189,850,000		300 Izin	895,984,558	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina (Badan Usaha)	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	108,500,000	50 Badan Usaha	39,897,200	50 Badan Usaha	356,350,000	75 Badan Usaha	764,400,000				80 Badan Usaha	1,269,147,200	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi										60 Laporan	600,000,000						
		2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	1,050,000,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.03.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900,000,000			1 Dokumen	900,000,000				
				Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										1 Dokumen	150,000,000						
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran (Izin)	40 Izin	40 Izin	153,355,800	45 Izin	370,379,825	50 Izin	332,000,000	100 Izin	700,000,000	100 Izin	700,000,000	335 Izin	2,255,735,625	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Izin	40 Izin	105,737,900	45 Izin	311,402,988	50 Izin	64,900,000	100 Izin	300,000,000			335 Izin	782,040,888	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				

2.15.03.1.06.01	Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										100 Dokumen	300,000,000				
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina (Badan Usaha) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100 Badan Usaha	120 Badan Usaha	47,617,900	150 Badan Usaha	58,976,837	150 Badan Usaha	267,100,000	150 Badan Usaha	400,000,000			670 Badan Usaha	773,694,737	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Regional (Penetapan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-			1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan	
		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional										1 Dokumen	-				
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpuan Regional (%)	80%	80%	1,213,654,997	90%	143,567,436	95%	10,314,317,825	97%	2,615,927,515	97.50%	3,598,643,918	97.50%	17,886,111,691	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan (Pelabuhan)	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	1,155,510,247	1 Pelabuhan	143,567,436	2 Pelabuhan	6,333,079,825	1 Pelabuhan	1,865,427,515			2 Pelabuhan	9,497,585,023	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang Terbangun										1 Unit	2,848,643,918				
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang Beroperasi/Dipelihara (Pelabuhan)	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	58,144,750	1 Pelabuhan	-	1 Pelabuhan	3,981,238,000	1 Pelabuhan	750,500,000	-	-	1 Pelabuhan	4,789,882,750	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang Beroperasi dan terpelihara										1 Unit	750,000,000				
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau (%)	75%	75%	610,582,500	78%	-	81%	728,625,000	83%	-	93.34%	-	93.34%	1,339,207,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
2.15.03.1.10.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatkan (Pelabuhan)	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	610,582,500	1 Pelabuhan	-	1 Pelabuhan	728,625,000	1 Pelabuhan	-			1 Pelabuhan	1,339,207,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun										1 Unit	-				
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	0%	0%	127,701,595	0%	201,304,326	20%	499,052,300	50%	1,000,000,000	80%	1,196,316,436	80%	3,024,374,657	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,196,316,436	1 Dokumen	1,196,316,436	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
2.15.05.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian										1 Dokumen	1,000,000,000				
2.15.05.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian yang di Sosialisasikan (Kegiatan)	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-			1 Kegiatan	-	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian										1 Dokumen	196,316,436				

Sasaran 2 : Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api (Penetapan)	0 Penetapan	0 Penetapan	127,701,595	0 Penetapan	201,304,326	0 Penetapan	499,052,300	1 Penetapan	1,000,000,000	1 Penetapan	-	2 Penetapan	1,828,058,221	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
	2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	75,201,695	0 Dokumen	127,997,450	0 Dokumen	409,634,300	1 Dokumen	700,000,000		-	1 Dokumen	1,312,833,445	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan										0 Dokumen						
	2.15.05.1.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana yang di Sosialisasikan (Kegiatan)	0 Kegiatan	1 Kegiatan	52,499,900	1 Kegiatan	73,306,876	1 Kegiatan	89,418,000	1 Kegiatan	300,000,000		-	5 Kegiatan	515,224,776	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji CobaPelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi										0 Dokumen	-					
				Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	50%	50%	36,513,576,644	60%	33,792,009,518	70%	50,068,447,875	80%	50,694,222,485	85%	68,565,189,646	85%	239,633,446,168	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	846	683	12,859,599,067	598	7,075,635,903	512	17,307,675,541	427	18,601,404,483	342	29,194,212,581	342	85,038,527,575	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan (%)	30%	40%	5,560,983,650	50%	5,575,782,700	60%	12,472,569,175	70%	5,614,492,828	80%	3,914,492,828	80%	33,138,321,181	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan (Km)	295 km	120 km	4,377,682,607	120 km	5,575,782,700	120 km	12,272,569,175	120 km	2,739,450,707			895 km	24,965,485,189	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia										60 Unit	2,739,450,707				
		2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi & Dipelihara (Unit)	20 Unit	25 Unit	1,183,301,043	30 Unit	-	30 Unit	200,000,000	45 Unit	2,875,042,121		-	210 Unit	4,258,343,164	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara										45 Unit	1,175,042,121				
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal (Perencanaan)	0 Perencanaan	1 Perencanaan	526,859,649	2 Perencanaan	940,080,225	2 Perencanaan	1,000,000,000	5 Perencanaan	1,816,253,420	4 Perencanaan	1,230,000,000	14 Perencanaan	5,513,193,294	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	526,859,649	2 Dokumen	940,080,225	2 Dokumen	1,000,000,000	5 Dokumen	1,816,253,420			14 Dokumen	4,283,193,294	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B									4 Dokumen	1,230,000,000					
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani (Orang)	500.000 Orang	550.000 Orang	1,016,718,500	600.000 Orang	89,807,600	650.000 Orang	1,783,640,266	700.000 Orang	5,483,692,695	750.000 Orang	17,026,500,793	750.000 Orang	25,400,359,854	UPTD Terminal	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Dokumen Perencanaan Terminal Tipe B (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	435,274,900	0 Dokumen	9,950,000	1 Dokumen	574,765,266	2 Dokumen	1,935,737,195			6 Dokumen	2,955,727,361	UPTD Terminal	Kalimantan Timur
				Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun										1 Unit	922,834,532				
		2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sapras Terminal Tipe B yang Dikembangkan (Terminal)	0 Terminal	1 Terminal	581,443,600	0 Terminal	79,857,600	1 Terminal	1,208,875,000	5 Terminal	3,547,955,500			7 Terminal	5,418,131,700	UPTD Terminal	Kalimantan Timur
				Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan										1 Unit	16,103,666,261				
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRL (%)	60%	70%	-	75%	-	80%	-	85%	1,976,652,000	100%	2,214,985,000	100%	4,191,637,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRL yang dikeluarkan (Rekomendasi)	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	5 Rekomendasi	114,985,000	15 Rekomendas			114,985,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan										10 Laporan	114,985,000				
		2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Pengakan Hukum di Jalan Provinsi (Lokasi)	0 Lokasi	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	8 Lokasi	1,700,000,000			16 Lokasi	1,700,000,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi										8 Laporan	1,700,000,000				
		2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	161,667,000	2 Laporan	400,000,000	5 Laporan	561,667,000		Kalimantan Timur
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan (Izin Andalalin)	0 Izin Andalalin	0 Izin Andalalin	-	0 Izin Andalalin	-	0 Izin Andalalin	-	0 Izin Andalalin	163,252,500	0 Izin Andalalin	749,505,920	0 Izin Andalalin	912,758,420	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin (Kegiatan)	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	10 Kegiatan	-	20 Kegiatan	163,252,500			100%	163,252,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi										2 Laporan	749,505,920				
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji (%)	40%	42.5%	989,414,701	50%	333,612,300	55%	846,000,000	75%	837,950,390	85%	599,617,390	85%	3,606,594,781	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
	2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi (Unit)	2 Unit	2 Unit	84,250,000	2 Unit	75,661,100	2 Unit	25,000,000	2 Unit	121,556,000			2 Unit	306,467,100	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor										3 Laporan	50,000,000					
	2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan (Terminal)	4 Terminal	4 Terminal	49,450,000	4 Terminal	-	4 Terminal	50,750,000	5 Terminal	147,628,300			5 Terminal	247,828,300	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal										6 Laporan	99,617,390					

			2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi (Pengemudi) Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	30 Pengemudi	30 Pengemudi	-	30 Pengemudi	-	30 Pengemudi	202,000,000	30 Pengemudi	301,643,540			120 Pengemudi	503,643,540	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan (Badan Usaha) Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	35 Badan Usaha	40 Badan Usaha	855,714,701	40 Badan Usaha	257,951,200	40 Badan Usaha	568,250,000	50 Badan Usaha	267,122,550			75 Badan Usaha	1,949,038,451	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia (Unit)	15 Unit	15 Unit	-	20 Unit	-	27 Unit	-	18 Unit	-	20 Unit	856,050,300	100 Unit	856,050,300	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit kendaraan yang tersedia (Unit)	15 Unit	15 Unit	-	20 Unit	-	27 Unit	-	18 Unit	-			100 Unit	-	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										20 Unit	704,515,300				
			2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah laporan yang tersedia (Laporan)	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-			5 Laporan	-	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi										5 Laporan	151,535,000				
			2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan (Penetapan)	0 Penetapan	0 Penetapan	4,175,267,804	1 Penetapan	87,254,078	1 Penetapan	455,999,900	1 Penetapan	100,000,000	1 Penetapan	850,000,000	1 Penetapan	5,668,521,782	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan (Dokumen) Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	4,175,267,804.15	1 Dokumen	87,254,078	1 Dokumen	455,999,900	0 Dokumen	-			2 Dokumen	4,718,521,782	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang Disosialisasikan (Kebijakan) Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Kebijakan	0 Kebijakan	-	0 Kebijakan	-	0 Kebijakan	-	1 Kebijakan	100,000,000			1 Kebijakan	100,000,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek (Penetapan)	0 Penetapan	0 Penetapan	-	0 Penetapan	-	0 Penetapan	-	1 Penetapan	856,050,300	1 Penetapan	-	1 Penetapan	856,050,300	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis (Dokumen) Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	704,515,300			1 Dokumen	704,515,300	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Uji Coba (Orang) Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	200 Orang	151,535,000			200 Orang	151,535,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan (Izin)	100 Izin	24 Izin	579,823,263	24 Izin	-	24 Izin	533,313,700	24 Izin	902,078,800	24 Izin	902,078,800	120 Izin	2,917,294,563	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu (Izin) Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Izin	24 Izin	33,000,000	24 Izin	-	24 Izin	71,958,700	24 Izin	385,340,200			24 Izin	490,298,900	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
															24 Unit	385,340,200				

		2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina (Badan Usaha)	100 Badan Usaha	24 Badan Usaha	546,823,263	24 Badan Usaha	-	24 Badan Usaha	461,355,000	24 Badan Usaha	516,738,600			120 Badan Usaha	1,524,916,863	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									24 Laporan	516,738,600						
			2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan (Izin)	10 Izin	10 Izin	10,531,500	10 Izin	49,099,000	10 Izin	216,152,500	10 Izin	599,941,550	10 Izin	599,941,550	50 Izin	1,475,666,100	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu (Permohonan Izin)	10 Izin	10 Izin	-	10 Izin	-	10 Izin	25,000,000	10 Izin	200,000,000			50 Izin	225,000,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan										10 Unit	200,000,000				
			2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi yang Dibina (Badan Usaha)	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	10,531,500	10 Badan Usaha	49,099,000	10 Badan Usaha	191,152,500	40 Badan Usaha	399,941,550			50 Badan Usaha	650,724,550	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi										40 Laporan	399,941,550				
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif (Trayek)	35 Trayek	35 Trayek	-	35 Trayek	-	35 Trayek	-	35 Trayek	251,040,000	35 Trayek	251,040,000	35 Trayek	502,080,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur			
2.15.02.1.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen analisis yang tersedia (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	251,040,000			2 Dokumen	251,040,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur			
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2 Dokumen	251,040,000							
	Sasaran 3 : Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN																		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100%	100%	23,653,977,577	100%	26,716,373,615	100%	32,760,772,334	100%	32,092,818,002	100%	39,370,977,065	100%	154,594,918,593	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan (%)	100%	100%	23,653,977,577	100%	26,716,373,615	100%	32,760,772,334	100%	32,092,818,002	100%	39,370,977,065	100%	154,594,918,593	Dinas Perhubungan	Samarinda	
		2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	69%	72.32%	705,082,650	72.40%	1,390,503,686	72.7%	1,169,533,800	75%	1,227,815,000	75.5%	1,177,433,800	75.5%	5,670,368,936	Dinas Perhubungan	Samarinda	
		2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja (2 Dok), SKM (2 Dok), Studi Gender Statistik (1Dok)	5 Dokumen	5 Dokumen	133,865,000	5 Dokumen	735,711,550	5 Dokumen	401,200,000	5 Dokumen	400,008,900			25 Dokumen	1,670,785,450	Dinas Perhubungan	Samarinda	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									6 Dokumen	399,980,000						
		2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (RKA 1 Dok, DPA 1 Dok, Laporan Rakornis 1 Dok, Laporan Forum PD 1 Dok)	4 Dokumen	4 Dokumen	356,220,850	4 Dokumen	454,500,000	4 Dokumen	374,333,800	4 Dokumen	379,289,400			20 Dokumen	1,564,344,050	Dinas Perhubungan	Samarinda	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									4 Dokumen	278,653,800						
		2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD (Laporan Monev 2 Dok, Laporan TEPPRA 12 Dok, Laporan Angkutan Lebaran 1 Dok, Laporan Natal dan Tahun Baru 1 Dok)	16 Dokumen	16 Dokumen	150,000,000	16 Dokumen	133,292,136	16 Dokumen	234,300,000	16 Dokumen	235,176,700			80 Dokumen	752,768,836	Dinas Perhubungan	Samarinda	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									16 Laporan	334,300,000						
		2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	4 Dokumen	4 Dokumen	64,996,800	4 Dokumen	67,000,000	4 Dokumen	159,700,000	4 Dokumen	213,340,000			20 Dokumen	505,036,800	Dinas Perhubungan	Samarinda	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5 Laporan	164,500,000							
		Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	13,581,154,642	100%	14,106,413,676	100%	17,160,759,824	100%	17,798,248,714	100%	18,453,708,714	100%	81,100,285,570	Dinas Perhubungan	Samarinda			
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	13,581,154,642	12 Bulan	14,106,413,676	12 Bulan	17,160,759,824	12 Bulan	17,798,248,714			60 Bulan	62,646,576,856	Dinas Perhubungan	Samarinda			

												84 Orang/Bular	17,847,088,714				
2.15.01.1.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Bulan	606,620,000	60 Laporan	-	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	30%	1,276,668,544	32%	315,388,413	35%	753,000,000	38%	252,980,000	40%	248,780,000	40%	2,846,816,957	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Stel	150 Stel	261,380,000	150 Stel	134,057,000	428 Stel	343,750,000	169 Stel	152,780,000	149 Paket	152,780,000	750 Stel	891,967,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Pegawai	17 Pegawai	1,015,288,544	20 Pegawai	181,331,413	30 Pegawai	409,250,000	50 Pegawai	100,200,000	65 Orang	96,000,000	74 Pegawai	1,706,069,957	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	2,698,665,419	12 Bulan	1,791,785,503	12 Bulan	1,571,020,000	12 Bulan	2,034,231,288	12 Bulan	2,040,829,335	60 Bulan	10,136,531,545	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500 Unit	550 Unit	20,173,000	570 Unit	23,954,000	580 Unit	24,000,000	590 Unit	49,998,353	8 Paket	49,998,353	2.927 Unit	118,125,353	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	50,355,000	12 Bulan	59,973,000	12 Bulan	69,600,000	12 Bulan	175,164,400	180 Paket	175,164,400	60 Bulan	355,092,400	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200.000 Lembar	200.000 Lembar	346,234,458	200.000 Lembar	187,885,550	200.000 Lembar	177,420,000	200.000 Lembar	200,077,535	6 Paket	199,275,582	1.250.000 Lembar	911,617,543	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	50 Kali	2,281,902,961	50 Kali	1,519,972,953	50 Kali	1,300,000,000	50 Kali	1,608,991,000	50 Laporan	1,616,391,000	250 Kali	6,710,866,914	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	30%	35%	1,124,081,500	40%	1,537,111,600	45%	391,958,500	50%	1,510,636,120	60%	2,785,983,785	60%	7,349,771,505	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	475,930,000	7 Unit	832,400,000	6 Unit	131,558,500	5 Unit	404,184,000	3 Unit	1,204,531,665	28 Unit	1,844,072,500	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	8 Unit	648,151,500	15 Unit	704,711,600	5 Unit	260,400,000	10 Unit	1,106,452,120	96 Unit	1,581,452,120	72 Unit	2,719,715,220	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,851,199,417	12 Bulan	4,750,685,182	12 Bulan	5,696,265,976	12 Bulan	3,623,307,770	12 Bulan	6,023,307,770	60 Bulan	21,944,766,115	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100 Surat	5.100 Surat	7,580,500	5.100 Surat	7,027,400	5.100 Surat	25,280,000	5.100 Surat	25,468,361	12 Laporan	25,468,361	5.100 Surat	65,356,261	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	561,201,067	12 Bulan	2,987,376,381	12 Bulan	3,164,770,200	12 Bulan	798,167,400	12 Laporan	3,198,167,400	60 Bulan	7,511,515,048	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1,282,417,850	12 Bulan	1,756,281,401	12 Bulan	2,506,215,776	12 Bulan	2,799,672,009	12 Laporan	2,799,672,009	60 Bulan	8,344,587,036	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	70%	80%	939,404,054	85%	674,769,450	90%	3,761,874,500	95%	1,909,019,110	100%	3,926,542,263	100%	11,211,609,377	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	101,435,000	2 Unit	215,360,000	4 Unit	74,545,000	4 Unit	121,068,100	2 Unit	120,359,300	4 Unit	512,408,100	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	172,444,900	10 Unit	154,270,550	10 Unit	116,046,500	10 Unit	291,891,710	10 Unit	294,941,710	20 Unit	734,653,660	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	246 Unit	144,181,204	257 Unit	119,981,000	279 Unit	385,424,000	285 Unit	204,890,000	246 Unit	204,890,000	350 Unit	854,476,204	Dinas Perhubungan	Samarinda
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	521,342,950	1 Gedung	185,157,900	1 Gedung	3,185,859,000	1 Gedung	1,291,169,300	1 Gedung	5,183,529,150	Dinas Perhubungan	Samarinda		

			UPTD TERMINAL																	
			2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	198,070,075	12 Bulan	139,833,700	12 Bulan	254,355,000	12 Bulan	418,671,758	12 Bulan	585,738,952	60 Bulan	1,596,669,485	UPTD Terminal	Samarinda
			2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit	10 Unit	7,726,750	10 Unit	7,531,000	10 Unit	7,800,000	60 Unit	58,392,302			205 Unit	81,450,052	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										5 Paket	58,392,302				
			2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	14,851,225	12 Bulan	14,599,450	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	25,043,150			60 Bulan	72,493,825	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										23 Paket	25,043,150				
			2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000 Lembar	90.000 Lembar	40,638,500	95.000 Lembar	23,528,250	100.000 Lembar	43,555,000	124.000 Lembar	47,836,306		519.000 Lembar		155,558,056	UPTD Terminal	Samarinda
					umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										7 Paket	82,303,500				
			2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	10 Kali	10 Kali	134,853,600	10 Kali	94,175,000	10 Kali	185,000,000	10 Kali	287,400,000			50 Kali	701,428,600	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										10 Laporan	420,000,000				
			2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	5%	25%	14,845,750	30%	316,470,400	35%	151,840,000	40%	259,085,000	50%	365,383,000	50%	1,107,624,150	UPTD Terminal	Samarinda
			2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		0 Unit	-	1 Unit	226,000,000	3 Unit	99,000,000	5 Unit	159,744,000			15 Unit	484,744,000	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										6 Unit	157,810,000				
			2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	0 Unit	3 Unit	14,845,750	5 Unit	90,470,400	7 Unit	52,840,000	12 Unit	99,341,000			39 Unit	257,497,150	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan										12 Unit	207,573,000				
			2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	873,891,926	12 Bulan	1,693,412,005	12 Bulan	1,820,164,734	12 Bulan	2,293,213,242	12 Bulan	3,493,269,446	60 Bulan	10,173,951,353	UPTD Terminal	Samarinda
			2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan	15 Surat	20 Surat	999,000	20 Surat	2,114,000	22 Surat	1,950,000	25 Surat	10,750,000			915 Surat	15,813,000	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										12 Laporan	16,000,000				
			2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	57,977,876	12 Bulan	48,783,047	12 Bulan	121,800,000	12 Bulan	282,963,434			60 Bulan	511,524,357	UPTD Terminal	Samarinda
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12 Laporan	297,963,434				
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan	814,915,050	12 Bulan	1,642,514,958	12 Bulan	1,696,414,734	12 Bulan	1,999,499,808			60 Bulan	6,153,344,550	UPTD Terminal	Samarinda			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										12 Laporan	3,179,306,012							
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	10%	10%	390,913,600	15%	-	20%	30,000,000	25%	765,610,000	30%	270,000,000	30%	1,456,523,600	UPTD Terminal	Samarinda			
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	-	3 Unit	-	5 Unit	15,800,000			15 Unit	15,800,000	UPTD Terminal	Samarinda			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya										6 Unit	20,000,000							
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	0 Gedung	2 Gedung	390,913,600	3 Gedung	-	5 Gedung	30,000,000	7 Gedung	749,810,000			7 Gedung	1,170,723,600	UPTD Terminal	Samarinda			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										7 Unit	250,000,000							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan 2019-2023.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel. 7.1 (TC.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton)	10.392.536 (orang) 325.051.663 (ton)	10.721.656 (orang) 341.529.897 (ton)	3.570.750 (orang) 294.478.397 (ton)	4.500.000 (orang) 307.000.000 (ton)	6.000.000 (orang) 337.000.000 (ton)	8.100.000 (orang) 370.000.000 (ton)	8.100.000 (orang) 370.000.000 (ton)
2	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	32%	33%	34%	35%	35%
3	Prosentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	85 %

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan :

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 menggambarkan perubahan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan sebagai langkah pedoman pentahapan rencana indikatif program, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan referensi dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan untuk pemantauan serta evaluasi kinerja pelayanan dan rencana pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur yang fungsinya sebagai pedoman dalam penjabaran program kerja 5 Tahun sebagai instrument pencapaian Sasaran dan Tujuan RPJMD Perubahan 2019 – 2023 dan Visi Misi Gubernur/Wakil Terpilih 2019 – 2023.

8.2. Saran :

1. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman dalam pengukuran kinerja Tahunan;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Dokumen Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan IKU Bidang – Bidang;
4. Untuk keselarasan dan sinergitas pencapaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur terpilih dan dalam upaya mengimbangi kedinamisan tuntutan masyarakat, Dokumen Renstra dapat dilakukan review minimal 1 Tahun Renstra berjalan, menyesuaikan kebijakan dan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2023.